



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Solok perlu disusun Rencana Aksi Daerah penanggulangan kemiskinan yang terarah, efisien dan terkoordinasi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan tahun 2022-2026 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2022-2026.

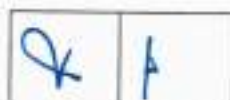
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun sudah bekerja sepanjang waktu atau mereka yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan primer mereka.
7. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan

	
---	---

- bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
 11. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen rencana aksi program dan kegiatan tahunan penanggulangan kemiskinan daerah dengan sasaran rumah tangga dan individu dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
 16. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
 17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
 18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.



Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. Pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan target masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial; dan
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah; dan
- b. mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 4

- (1) RAD penanggulangan kemiskinan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan
 - b. BAB II : kondisi umum daerah;
 - c. BAB III : profil kemiskinan daerah;
 - d. BAB IV : kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah;
 - e. BAB V : program dan kegiatan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan daerah; dan
 - f. BAB VI : lokasi prioritas.
- (2) RAD penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

g	p
---	---

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 11 Februari 2022
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundang di Arosuka
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JASRA ARNODA

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TAHUN 2022-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Acuan Kebijakan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu masyarakat miskin juga ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif serta ketidakmampuan dalam menjangkau/mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan selama ini adalah *database* kemiskinan yang belum akurat maupun variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan seseorang (kepala keluarga) serta keterpaduan program antar OPD dan dengan Dunia Usaha serta masyarakat. Untuk itu penyediaan *database* yang akurat perlu dilakukan sehingga ukuran kemiskinan telah mendekati realita yang ada di lapangan dan keterpaduan program perlu disinergikan.

Penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang kemudian diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang

	
---	---

Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota. RAD wajib dibuat oleh setiap daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tiap daerah.

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan dokumen strategi aksi untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. Secara khusus, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD. Dengan demikian, dokumen RAD selanjutnya dapat menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk memastikan strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka RAD harus dijabarkan atau dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan akan diintegrasikan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RAD diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi para pelaku pembangunan, sehingga strategi dan rencana aksi dan sasaran RAD tidak hanya menjadi gerakan pemerintah daerah tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pelaku pembangunan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RAD akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

1.2 Pendekatan Kebijakan Nasional

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple-track problem*, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun namun penurunannya melambat. Kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah/provinsi (wilayah timur dan wilayah barat) maupun kesenjangan pendapatan/konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan



kemiskinan). Dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Peraturan Presiden tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

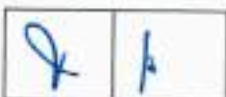
- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Arah dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan di daerah yang terdiri atas:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

1.3 Pokok Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Maksud penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk menjabarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai



pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Solok sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan tujuan penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2022-2026 adalah untuk:

- a. membangun konsensus bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (*right based approach*) serta pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan;
- b. menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs);
- c. menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan lembaga lainnya; dan
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Geografis

2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Solok berada pada posisi $00^{\circ}32'14''$ - $01^{\circ}46'45''$ Lintang Selatan, $100^{\circ}25'00''$ - $101^{\circ}41'41''$ Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738 Km²) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang; dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
- sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Wilayah administrasi wilayah Kabupaten Solok tergambar melalui peta administrasi berikut ini :



Sumber: RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Solok

Secara administratif Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan, 74 nagari dan 414 jorong. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan X Koto Diatas merupakan kecamatan yang memiliki nagari paling banyak, masing-masing 9 nagari, sedangkan kecamatan yang memiliki sedikit nagari adalah Kecamatan Pantai Cermin, Danau Kembar dan Junjung Sirih, masing-masing 2 nagari. Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto Diatas, sebanyak 52 jorong dan kecamatan yang memiliki sedikit jorong adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Junjung Sirih, masing-masing 11 jorong. Data lengkap sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

2	1
---	---

Tabel 2.1 Luas Wilayah Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas Daerah (Ha)
1.	Pantai Cermin	Surian	2	28	36.600
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	43.900
3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	28.400
4.	Payung Sekaki	Kubang Nan Duo	3	11	39.200
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	57.500
6.	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43	9.400
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	7.600
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	38.500
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	10.900
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	17.100
11.	Kubung	Selayo	8	37	19.200
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	25.113
13.	Junjung Sirih	Panninggahan	2	11	14.687
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	25.700
	Total		74	414	373.800

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tigo Lurah dengan luas 57.500 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.600 Ha. Dengan demikian terdapat ketimpangan luas wilayah secara signifikan.

2.1.2 Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Solok sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit mulai dari dataran tinggi di bagian selatan hingga

dataran yang relatif rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 329 m hingga 1.458 m di atas permukaan laut.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Solok ini dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X Koto Singkarak, Junjung Sirih, IX Koto Sungai Lasi, Kubung, dan Bukit Sundi;
2. Ketinggian antara 500 – 1.000 m di atas permukaan laut, tersebar di bagian utara, yaitu Kecamatan Tigo Lurah, Gunung Talang, Kecamatan X Koto Diatas dan Payung Sekaki; dan
3. Ketinggian 1.000 – 1.500 m di atas permukaan laut, tersebar di Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, Lembang Jaya dan Danau Kembar.

Berdasarkan kemiringan lereng dan luasnya yang bersumber dari data Status Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dapat dibagi atas beberapa klasifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Klasifikasi Lereng di Kabupaten Solok

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Datar, Agak Landai	0 – 8	84.642,97	22,64
2.	Landai	8 – 15	90.005,35	24,08
3.	Agak Curam	15 – 25	118.176,04	31,61
4.	Curam	25 – 40	70.286,53	18,80
5.	Sangat Curam	> 40	10.689,11	2,86

Sumber: Hasil Analisis Peta, 2011

Berdasarkan kondisi kemiringan lereng di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0 – 8% (datar), terkonsentrasi di beberapa tempat yang mencakup sebagian Kecamatan X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Kubung, Bukit Sundi, Gunung Talang, Payung Sekaki, Danau Kembar, dan Lembah Gumanti;
2. Kondisi kemiringan 8 – 15% (datar s/d landai), yang terkonsentrasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok;



3. Kondisi kemiringan 15 – 25% (agak curam), yang menyebar secara merata di semua kecamatan;
4. Kondisi kemiringan 25 – 40% (curam), yang terkonsentrasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok khususnya pada daerah barat dan selatan; dan
5. Lahan dengan kemiringan >40% (sangat curam), tersebar secara merata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Solok dan lebih terkonsentrasi pada daerah bagian barat dan selatan.

2.1.3 Hidrologi

Hidrologi merupakan kondisi tata air yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan (faktor internal) dan kondisi tutupan lahan (kondisi eksternal). Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Solok dapat dikatakan sangat baik seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.3. Dengan pola aliran pada umumnya adalah bersifat dendritik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber air baik yang berupa air permukaan maupun mata air dan air tanah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Air Permukaan

Keadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan materi penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air mengalir melalui sungai-sungai kecil dengan membentuk pola aliran yang berbentuk dendritik dan karena sifat hujan arografisnya yang tinggi memungkinkan kondisi sungai untuk mengalir sepanjang tahun. Sebagian besar wilayah Kabupaten Solok merupakan bagian dari dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir kearah timur yaitu DAS Agam Kuantan – Indragiri dan DAS Batang Hari.

Tabel 2.3 Jumlah Sungai di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
1.	Pantai Cermin	Batang Lolo	Lolo
		Batang Indarung	Surian / Lolo
		Batang Kulemban	Surian
		Batang Pisau Hilang	Lolo



No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
		Batang Air Dalik	Lolo
		Batang Hari	Lolo
2.	Lembah Gumanti	Batang Gumanti	Alahan Panjang
		Batang Hari	Alahan Panjang
		Batang Sarasah	Sungai Nanam/ Salimpat
		Batang Air Dingin	Air Dingin
		Batang Galagah	Alahan Panjang
3.	Hiliran Gumanti	Batang Lolo	Sarik Alahan Tigo
		Batang Gumanti	Salimpat/ Talang Babungo/Sungai Abu/ Sarik Alahan Tigo
		Batang Baliang Besar	Talang Babungo
		Batang Baliang Kecil	Talang Babungo
4.	Payung Sekaki	Batang Sikinjang	Sirukam
		Batang Sungai	Supayang
5.	Tigo Lurah	Batang Palangki	Muaro Sabik Aie/ Rangkiang Luluih/ Batu Bajanjang
		Batang Sungai Gemuruh	Rangkiang Luluih
		Batang Sibaso	Garabak
		Batang Momongan	Lubuak Tareh
		Batang Simanau	Rangkiang Luluih
		Batang Kapujan	Rangkiang Luluih/ Kapujan
6.	Lembang Jaya	Batang Lembang	Taluak Nan Tigo/ Limau Lunggo/ Batu Banyak/ Koto Anau/ Balai Bawah

Q	P
---	---

No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
		Batang Lurah Aie Abu	Balai Bawah
		Batang Sungai Badak	Koto Anau
7.	Danau Kembar	Batang Lembang	Kampung Batu Dalam
8.	Gunung Talang	Batang Cupak	Cupak/ Sungai Janiah
		Batang Paneh Gadang	Sungai Janiah /Cupak
		Batang Sumani	Batang Barus/ Koto Gadang Jawi-Jawi/ Koto Gaek/ Guguak/ Talang/ Cupak
		Batang Paneh Kaciak	Sungai Janiah/ Cupak
		Batang Sungai Dareh	Batang Barus
		Batang Air Baliang	Batang Barus
		Batang Sipatah	Jawi-jawi Guguak
9.	Bukit Sundi	Batang Halim	Dilam/ Parambahan/ Kinari
		Batang Lembang	Kinari/Muaro Paneh
		Batang Paneh Gadang	Muara Panas
		Batang Sungai Badak	Muara Panas
		Batang Sungai Dareh	Kinari
		Batang Andaleh	Parambahan/ Kinari
10.	IX Koto Sungai Lasi	Batang Sungai Lasi	Guguak Sarai/ Sungai Jambur/ Pianggu
		Batang Rimbo Batang	Guguak Sarai
		Batang Lawas	Sungai Durian/ Bukit Bais/ Siaro-aro
		Batang Laing	Guguak Sarai
		Batang Indudur	Indudur/ Pianggu
		Batang Luak Sungkai	Koto Laweh/ Indudur

2	1
---	---

No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
		Batang Sungai Sariak	Sungai Jambur
		Batang Sei. Jambak	Pianggu
		Batang Sei. Batuang	Pianggu
		Batang Sigaranggan	Taruang-taruang
		Batang Koto Tuo	Taruang-taruang/ Pianggu
		Batang Sci. Pisang	Siaro-aro
		Batang Swi Tengah	Bukit Bais
		Batang Sikabu	Bukit Bais
		Batang Sonsang	Sungai Durian
11.	Kubung	Batang Gantuang	Gantung Ciri
		Batang Sungai Sarik	Gantung Ciri
		Batang Gawan Kaciak	Koto Hilalang
		Batang Gawan Besar	Koto Hilalang/ Selayo
		Batang Cupak	Koto Baru
		Batang Sumani	Koto Baru/ Selayo/ Tanjung Bingkuang
		Batang Lembang	Koto Baru
		Batang Manungguang	Gantung Ciri/ Selayo
		Batang Anak Air Gantung	Gantung Ciri/ Selayo
		Batang Sungai Buluh	Koto Baru
		Batang Simo	Panyakalan/ Gaung/ Saok Laweh
12.	X Koto Singkarak	Batang Imang	Koto Sani
		Batang Sumani	Sumani

No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
		Batang Saniang Bakar	Saniang Baka
		Batang Air Raso	Saniang Baka
		Batang Rimbo Panjang	Sumani
13.	Junjung Sirih	Batang Paninggahan	Paninggahan
		Batang Ulu Air	Paninggahan
		Batang Ondoh	Paninggahan
		Batang Muara Pingai	Muara Pingai
		Batang Taraso	Muara Pingai
14.	X Koto Diatas	Batang Katialo	Katialo/Sulit Air
		Batang Aia Tabek	Tanjung Balit
		Batang Kajai	Sibarambang
		Batang Balansiah	Paninjauan
		Batang Batu Laweh	Paninjauan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, 2021

Selain sungai, Kabupaten Solok juga mempunyai 5 (lima) Danau yang terdiri dari :

1. Danau Diatas yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti dan Danau Kembar;
2. Danau Dibawah yang berada di Kecamatan Danau Kembar;
3. Danau Talang yang berada di Kecamatan Danau Kembar;
4. Danau Singkarak yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak dan Junjung Sirih. Danau ini juga terdapat pada wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar;
5. Danau Tuo yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak.

Data lengkap keberadaan danau di Kabupaten Solok sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4



Tabel 2.4 Jumlah Danau di Kabupaten Solok

No	Nama Danau	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (Km)	Luas (Km2)
1.	Danau Diatas	Lembah Gumanti Danau Kembar	6,25	2,75	17,2
2.	Danau Dibawah	Danau Kembar	5,62	3,00	16,9
3.	Danau Talang	Danau Kembar	1,5	0,88	1,3
4.	Danau Singkarak	X Koto Singkarak Junjung Sirih	20,75	6,25	129,7
5.	Danau Tuo	X Koto Singkarak	0,45	0,26	0,084

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2020 dan DPUPR, 2021

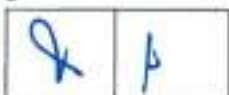
2. Mata Air

Kondisi alam di Kabupaten Solok banyak dijumpai mata air yang berasal dari lembah atau kaki perbukitan. Hal ini disebabkan adanya lapisan batuan yang kedap air dibawahnya yang mengalami peregangan tidak terus ke dalam melainkan ke arah lateral dan muncul di kaki tebing (lembah) atau kaki perbukitan sebagai mata air. Adanya mata air dapat dimanfaatkan menjadi cadangan sumber air bersih.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber mata air di Kabupaten Solok belum optimal. Pemanfaatan sumber mata air yang ada selama ini, sebagian besar dikelola/dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok, seperti di Nagari Selayo dan Nagari Gaung Kecamatan Kubung. PDAM juga memanfaatkan sumber mata air di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, Nagari Kacang dan Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya.

3. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh faktor hujan, luas dan kondisi daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah bebas yang cukup besar dapat dijumpai di sekitar Kabupaten Solok yang berkisar antara 1 – 3 meter di bawah permukaan air tanah.



Sedangkan di wilayah lainnya relatif berkedudukan dalam, yaitu berkisar antara 5 – 15 meter di bawah permukaan air tanah, kecuali sekitar daerah lembah yang agak lebar dengan air tanahnya yang dangkal.

2.2 Kondisi Demografis

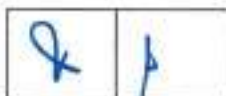
Aspek kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Penduduk dalam proses pembangunan merupakan objek dan subjek pembangunan nantinya. Penduduk diharapkan terlibat mulai dari proses perencanaan, implementasi rencana serta menikmati hasil dari implementasi tersebut. Penyebaran penduduk Kabupaten Solok tidak merata disetiap kecamatan. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Solok menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Jumlah Danau di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pantai Cermin	11.176	11.170	22.346
2.	Lembah Gumanti	30.667	30.047	60.714
3.	Hiliran Gumanti	9.209	8.949	18.158
4.	Payung Sekaki	4.530	4.523	9.053
5.	Tigo Lurah	5.347	5.334	10.681
6.	Lembang Jaya	14.995	14.725	29.720
7.	Danau Kembar	11.204	10.856	22.060
8.	Gunung Talang	26.613	26.815	53.428
9.	Bukit Sundi	13.022	13.440	26.462
10.	IX Koto Sei. Lasi	5.439	5.301	10.740
11.	Kubung	30.805	30.460	61.265
12.	X Koto Diatas	9.371	9.538	18.909
13.	X Koto Singkarak	16.848	17.128	33.976
14.	Junjung Sirih	6.415	6.400	12.815
	Jumlah	195.641	194.686	390.327

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk Kabupaten Solok Tahun 2020 berjumlah 390.327 jiwa meningkat sebesar 2.459 jiwa dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Solok Tahun 2019 sebanyak 387.868 jiwa. Kecamatan Kubung memiliki proporsi jumlah penduduk yang paling besar yakni sebanyak 61.265 jiwa disusul Kecamatan Lembah Gumanti



dengan proporsi sebesar 60.714 jiwa. Kecamatan Payung Sekaki menjadi kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk paling kecil yakni 9.053 jiwa.

Ditinjau dari segi gender, penduduk Kabupaten Solok memiliki rasio yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	2016	374.676	189.217	50,50	185.459	49,50
2	2017	377.292	191.256	50,69	186.036	49,31
3	2018	384.091	193.310	50,27	190.781	49,73
4	2019	387.868	194.661	50,18	193.207	49,81
5	2020	390.327	195.641	50,12	194.686	49,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Dilihat dari jenis kelamin, penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2020 terdiri dari 195.641 laki-laki dan 194.686 perempuan. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun terakhir relatif sama, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sekitar 50,20% dan perempuan sekitar 49,80%.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Solok tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk		Kepadatan Jiwa/Km
			Jumlah	%	
1	Pantai Cermin	366,00	22.346	5,72	61
2	Lembah Gumanti	459,72	60.714	15,55	132
3	Hiliran Gumanti	263,28	18.158	4,65	69
4	Payung Sekaki	364,50	9.053	2,32	25
5	Tigo Lurah	602,50	10.681	2,74	18
6	Lembang Jaya	99,90	29.720	7,61	297
7	Danau Kembar	70,10	22.060	5,65	315
8	Gunung Talang	385,00	53.428	13,69	139
9	Bukit Sundi	109,00	26.462	6,78	243
10	IX Koto Sei. Lasi	171,00	10.740	2,75	63
11	Kubung	192,00	61.265	15,70	319
12	X Koto Diatas	257,00	18.909	4,84	74
13	X Koto Singkarak	295,50	33.976	8,70	115
14	Junjung Sirih	102,50	12.815	3,28	125
Jumlah		3.738	390.327	100,00	104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Solok lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk sebesar 104 jiwa/km², sedangkan Tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa/km², hanya mengalami kenaikan sebesar 4 jiwa/km². Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Solok relatif tidak merata. Kecamatan Kubung adalah kecamatan yang paling padat di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Solok yaitu sebesar 319 jiwa/km² dan Kecamatan Payung sekaki merupakan kecamatan yang paling renggang penduduknya yaitu sebesar 2,32%.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok pun mengalami peningkatan. Lebih lengkap laju pertumbuhan penduduk pertahun dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,68	0,70	1,80	0,98	0,63
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	374.676	377.292	384.091	387.868	390.327

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Jika melihat data jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk 5 (lima) tahun terakhir sebesar 4,18. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertahun paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,80 dan terendah tahun 2020 sebesar 0,63.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Grafik 2. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

2.3 Kondisi Kesejahteraan Daerah

2.3.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional diukur melalui 17 (tujuh belas) lapangan usaha struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 5,04 lebih lanjut di tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,12 akibat dari pandemi Covid-19.

Sk P

Tabel 2. 9 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha/Industri	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,97	4,34	2,60	2,70	0,86
2	Pertambangan dan Penggalian	4,82	2,88	2,90	3,09	-3,15
3	Industri Pengolahan	6,77	-2,50	6,20	-2,12	-3,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,50	4,25	2,49	2,00	-6,01
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	-1,82
6	Konstruksi	8,38	8,72	9,10	9,59	-3,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	10,43	10,73	11,01	-0,78
8	Transportasi dan Pergudangan	12,15	12,23	12,19	12,17	-11,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,81	0,84	0,91	-9,87
10	Informasi dan Komunikasi	5,40	5,60	5,88	6,41	7,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	1,75	1,70	1,67	0,26
12	<i>Real Estate</i>	0,83	0,82	0,83	0,85	0,01
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	-4,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	5,72	5,77	6,12	0,60
15	Jasa Pendidikan	3,14	3,27	3,41	3,66	4,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,25	1,29	1,39	7,22
17	Jasa lainnya	0,94	0,97	1,00	1,08	-11,66
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,31	5,32	5,32	5,04	-1,12

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan usaha PDRB mengalami kontraksi kecuali terdapat 7 (tujuh) sektor lapangan usaha yang tetap tumbuh diantaranya sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *Real estate*, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib, Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Bahkan sektor informasi dan komunikasi, jasa Pendidikan dan jasa Kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya.

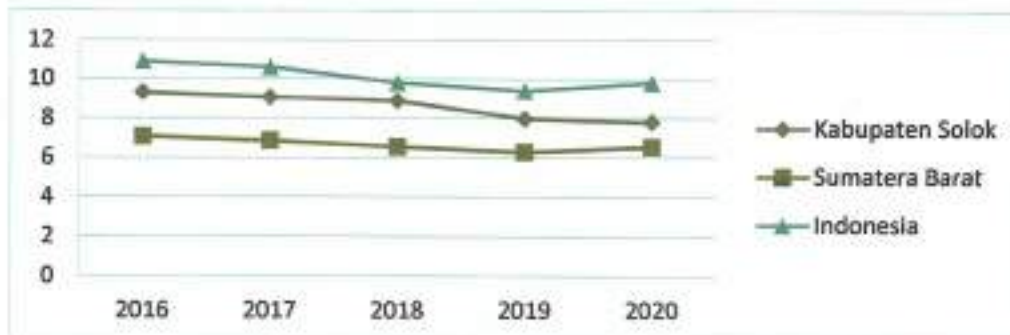
2.3.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Solok pada rentang tahun 2016-2020 selalu menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase kemiskinan di Kabupaten Solok sebesar 9,32% pada Tahun 2016 menjadi 7,81% pada Tahun 2020. Angka ini juga berada di bawah persentase Nasional yang menunjukkan persentase 9,8% pada tahun 2020. Akan tetapi angka ini masih berada di atas persentase penduduk miskin provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 6,56% pada tahun 2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.10 dan grafik 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 10 Persentase Kemiskinan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan Indonesia

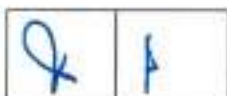
Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Solok	9,32	9,06	8,88	7,98	7,81
Sumatera Barat	7,09	6,87	6,55	6,29	6,56
Indonesia	10,9	10,6	9,8	9,4	9,8

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016-2021



Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016-2020

Grafik 2. 3 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

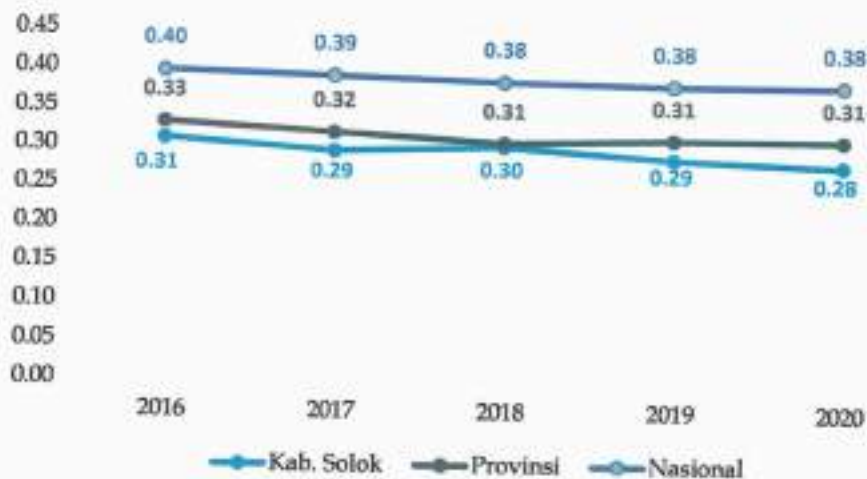


2.3.3 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetail :

1. Indeks Gini $< 0,3$ = Ketimpangan rendah
2. Indeks Gini $= 0,5$ = Ketimpangan sedang
3. Indeks Gini $> 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan, di Kabupaten Solok masih berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 indeks gini di Kabupaten Solok sebesar 0,31 turun menjadi 0,277 pada Tahun 2020, yang artinya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan di Kabupaten Solok semakin mengecil. Namun di tahun 2018 indeks gini Kabupaten Solok sempat mengalami kenaikan sebesar 0,006 walau tidak terlalu signifikan. Jika dibanding dengan provinsi dan Nasional Indeks Gini Kabupaten Solok masih rendah atau berada di bawah provinsi dan nasional. Hal ini dapat terlihat pada Grafik 2.4



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Grafik 2. 4 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Solok dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020



2.3.4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Menurut BPS Lapangan usaha/bidang pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ kantor tempat kepala ruta/anggota ruta bekerja. Tabel 2.10 menunjukkan Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja menurut lapangan usaha utamanya. Lapangan pekerjaan utama terdiri dari sektor terkait pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor lainnya.

Dari tabel terlihat distribusi lapangan pekerjaan utama Kabupaten Solok paling banyak didominasi pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Terlihat pada tahun 2020 dari 191.301 jiwa yang bekerja, sebanyak 111.810 jiwa bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Solok memiliki mata pencarian bertani, dan beras merupakan komoditas yang terkenal di Kabupaten Solok.

Tabel 2. 11 Distribusi Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	98.050	86.017	90.026	96.103	111.810
Industri Pengolahan	4.061	7.678	5.951	8.369	21.267
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	26.969	27.185	28.848	37.545	
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	18.626	22.009	17.763	12.657	58.224
Lainnya	16.485	18.853	21.693	20.977	
Total	164.191	161.742	164.281	175.651	191.301

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2016-2021

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM Kabupaten Solok memperlihatkan trend yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun sempat mengalami stagnasi pada tahun



2020. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang berdampak pada penurunan pengeluaran riil perkapita masyarakat. Namun demikian perubahan pertumbuhan IPM masih terlihat berfluktuasi pada periode yang sama. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

**Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia Harapan Hidup	67,5	67,65	68,18	68,19	68,58
2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04
3	Rata-rata Lama Sekolah	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86
4	Pengeluaran Riil Per Kapita	908.267	918.667	924.261	1.083.699	1.053.705
Indeks Pembangunan Manusia		67,67	67,86	68,60	69,08	69,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 2.6 Perbandingan Usia Harapan Hidup antara Nasional, Propinsi dan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020



Perkembangan IPM baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Solok cenderung berfluktuatif, namun demikian kinerja IPM Kabupaten Solok relatif lebih rendah dibanding dengan Provinsi dan Nasional. Hal ini terlihat dari masih rendahnya rata-rata capaian IPM Kabupaten Solok (68,46) dibanding provinsi (69,21) dan Nasional (71,29).

Berdasarkan indikator penyusunnya indikator IPM Kabupaten Solok memperlihatkan kinerja yang terus membaik (Tabel 2.10). Namun akibat pandemi *Covid-19* dimensi ekonomi yang dicerminkan dari pengeluaran riil perkapita sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019.

Terdapat faktor-faktor yang berperan penting dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Faktor pencapaian IPM dari sektor Kesehatan seperti Jumlah Kematian Ibu (AKI), Jumlah Kematian Balita (AKB), Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Jumlah Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus, jumlah keluarga akses sanitasi yang layak (Jamban Sehat), jumlah kecamatan melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) seperti yang terlihat pada tabel 2.13 di bawah ini :

Tabel 2.13 Faktor yang Berperan Penting dalam Pencapaian IPM pada Aspek Kesehatan

No	Kecamatan	Puskesmas	A KI	AKB	BBLR	Gizi Balita			Jamban Sehat	STBM
						Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus		
1	Pantai Cermin	Surian	1	0	0	135	222	96	2.758	0
2	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	0	2	35	73	232	44	5.641	0
	Lembah Gumanti	Sungai Nanam	0	5	18	54	269	9	4.049	0
3	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	2	3	24	118	278	60	2.043	0
4	Payung Sekaki	Sirukam	0	0	5	52	116	33	1.721	0
5	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	0	0	3	95	147	61	743	0
6	Lembang Jaya	Bukit Sileh	0	2	31	187	396	98	3.273	0
7	Danau Kembar	Simpang Tanjung Nan IV	0	2	26	187	335	80	3.252	0
8	Gunung Talang	Talang	1	1	10	76	152	35	4.189	0




No	Kecamatan	Puskesmas	A KI	AKB	BBLR	Gizi Balita			Jamban Sehat	STBM
						Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus		
	Gunung Talang	Jua Gaek	0	0	15	75	67	80	895	0
	Gunung Talang	Kayu Jao	0	3	14	68	192	13	1.518	0
9	Bukit Sundi	Muara Panas	0	1	4	177	297	96	5.428	0
10	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	1	0	3	66	124	28	2.375	0
11	Kubung	Tanjung Bingkung	2	1	7	102	122	70	3.493	0
	Kubung	Selayo	1	2	13	222	268	177	7.565	0
12	X Koto Diatas	Paninjauan	0	0	8	61	90	36	1.559	0
	X Koto Diatas	Sulit Air	0	0	7	44	60	27	2.030	0
13	X Koto Singkarak	Singkarak	1	0	18	135	234	82	6.328	0
14	Junjung Sirih	Paninggahan	3	1	2	76	101	48	1.651	0
Jumlah			1 2	23	243	2003	3702	1173	60511	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Berdasarkan tabel 2.13 di atas masih terlihat adanya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Solok. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) juga tersebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Solok kecuali Kecamatan Pantai Cermin yang tidak memiliki angka BBLR. Gizi Balita Kurang, Balita Pendek dan juga Balita Kurus tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Solok. Sedangkan untuk fasilitas sanitasi yang layak terdapat 60.511 Jamban Sehat di Kabupaten Solok dan masih belum adanya kecamatan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM).

Selain sektor Kesehatan, ada juga faktor-faktor yang berperan penting dalam pencapaian IPM yaitu pada aspek pendidikan seperti jumlah siswa, jumlah tenaga pendidik dan jumlah rombongan belajar seperti yang terlihat dalam Tabel 2.14 Dibawah ini:

Q	P
---	---

Tabel 2. 14 Faktor yang Berperan Penting dalam Pencapaian IPM pada Aspek Pendidikan

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Jumlah Rombel		Jumlah Guru	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Pantai Cermin	21	4	146	31	189	58
2	Lembah Gumanti	37	8	310	78	365	178
3	Hiliran Gumanti	25	4	156	25	208	61
4	Payung Sekaki	10	3	60	17	87	43
5	Tigo Lurah	15	5	95	18	117	50
6	Lembang Jaya	23	6	167	50	210	106
7	Danau Kembar	14	3	127	21	141	46
8	Gunung Talang	45	8	334	109	487	205
9	Bukit Sundi	22	5	146	38	191	84
10	IX Koto Sungai Lasi	17	2	102	10	128	29
11	Kubung	43	9	320	69	453	160
12	X Koto Diatas	33	3	193	17	243	40
13	X Koto Singkarak	38	9	237	54	321	126
14	Junjung Sirih	15	2	90	18	106	42
Jumlah		358	71	2483	555	3246	1228

Dari Tabel 2.14 terlihat bahwa SD dan SMP sudah tersebar di seluruh Kabupaten Solok. Ada 358 SD di Kabupaten Solok dan 71 SMP di Kabupaten Solok, dimana setiap Kecamatan sudah memiliki SD dan SMP. Jumlah Rombel SD di Kabupaten Solok yaitu 2.483 rombel sedangkan rombel SMP berjumlah 555 rombel. Jumlah Guru SD yaitu 3.246 Guru sedangkan Guru SMP berjumlah 1.228 Guru.

2.3.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Prinsip SDGs memiliki prinsip tidak meninggalkan satu orang pun



merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Tabel 2. 15 Capaian SDG's di Kabupaten Solok

No	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Diluar Target Nasional	Tidak Tersedia
1	Tanpa Kemiskinan	24	13	9	1	1
2	Tanpa Kelaparan	11	6	1	0	4
	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	34	27	4	0	3
4	Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	13	8	4	1	0

	
---	---

No	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Diluar Target Nasional	Tidak Tersedia
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	14	8	4	0	2
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua	18	6	10	1	1
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	2	0	1	1	0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan	19	4	10	0	5

2	1
---	---

No	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Diluar Target Nasional	Tidak Tersedia
	yang layak untuk semua					
9	Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	13	4	4	4	1
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara	11	4	1	4	2
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	4	4	4	1
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	5	0	1	11	3
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan	2	0	2	0	0

Q	P
---	---

No	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Diluar Target Nasional	Tidak Tersedia
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	4	1	2	0	1
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun	21	13	7	0	1

9	1
---	---

No	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Diluar Target Nasional	Tidak Tersedia
	kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan					
17	Pembangunan Berkelanjutan	16	10	2	1	3
TOTAL		220	110	66	14	30

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat diketahui bahwa terdapat 30% indikator SDGs belum tercapai dan 14% indikator belum tersedia. Baru 50% target SDGs yang tercapai di Kabupaten Solok. Secara umum Target SDGs sudah harus tercapai ditahun 2030. Oleh karena itu, masih ada kesempatan Kabupaten Solok untuk mengejar dan memenuhi capaian indikator tersebut.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN SOLOK

3.1 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan serangkaian data statistic yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan kemiskinan yang menjadi pokok perhatian atau usaha pembangunan masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kehidupan secara layak seperti Keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi Kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi.

Menurut BPS (2020) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengukuran dapat dilakukan dengan pendekatan moneter, dengan membandingkan data pengeluaran dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau *basic needs approach*. Batas ini disebut dengan garis kemiskinan atau *poverty line*. Poverty Line umumnya digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pen geluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Selain dengan pendekatan moneter, kemiskinan juga dapat diukur dengan aspek lain seperti akses terhadap layanan Pendidikan, Kesehatan, dan informasi public, kepemilikan barang berharag, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. *Head Count Index* (HCI-P₀) atau persentasi penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Terdapat Beberapa indikator untuk melihat kondisi kemiskinan. Diantaranya adalah indikator berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- b. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama

- c. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut/atau tembok tidak diplester
- d. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- e. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- f. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- g. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/ orang
- h. Mempunyai sumber air minum berasal dari air sumur atau mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- i. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memnuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- j. Tidak mampu atau mengalami kesulitan ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
- k. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

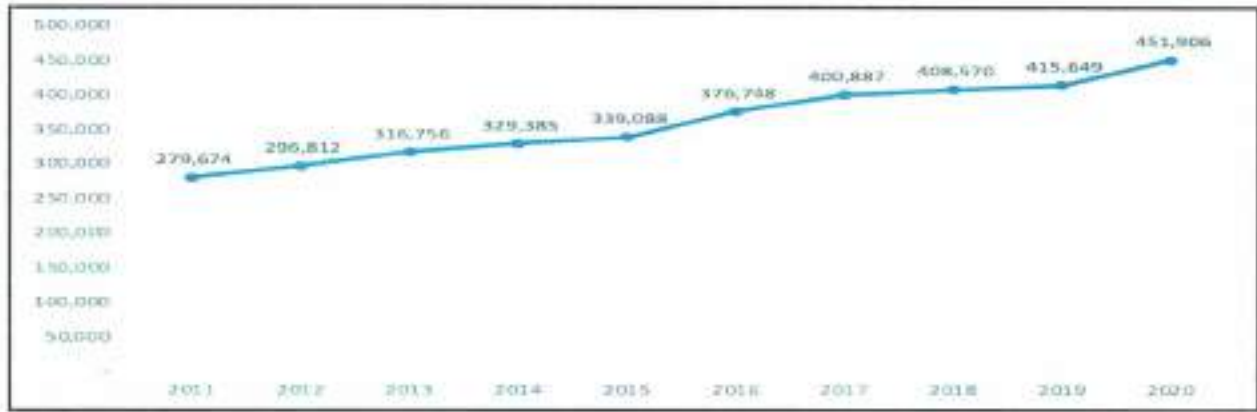
3.2 Identifikasi Masalah Kemiskinan

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menimbulkan guncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar bahkan lockdown mengakibatkan peningkatan PKH, penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Adanya peningkatan PKH berindikasi pada peningkatan kemiskinan yang berpotensi terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

3.2.1 Trend Kemiskinan Kabupaten Solok

Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Kabupaten Solok sepanjang tahun 2011 – 2020 mengalami tren positif. Tercatat pada tahun 2020, GK Kabupaten Solok Rp451.906,-. Kenaikan Garis Kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh adanya inflasi yang relatif stabil sehingga harga komoditas pokok cenderung naik dari waktu ke waktu.





Sumber: Susenas Semester I (diolah)

Grafik 3.1. Garis Kemiskinan Kabupaten Solok (dalam rupiah) Tahun 2011 – 2020

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok relatif mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Tercatat, pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok berada pada angka 7.81. Artinya, ada sebanyak 7.81 persen pendudukan Kabupaten Solok yang memiliki pengeluaran di bawah GK dalam memenuhi kebutuhan dasar pada tahun 2020. Meskipun adanya fenomena pandemi Covid-19, terjadi penurunan kemiskinan dari 7.98 persen pada tahun 2019 menjadi 7.81 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan konsumsi kebutuhan masyarakat terutama pada kebutuhan pokok selama pandemi. Sementara itu, sektor pertanian tetap tumbuh positif dan tidak mengalami guncangan selama pandemi. Hal ini menyebabkan nilai konsumsi kebutuhan dasar penduduk Kabupaten Solok tetap meningkat.

Dilihat dari indeks P1 (kedalaman kemiskinan) tahun 2020 sebesar 1,16 naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 0,71 hal ini menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin dalam dari garis kemiskinan. Hal ini tidak berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin. Kondisi ini mengindikasikan terjadi perbaikan ekonomi penduduk yang rentan miskin menjadi lebih baik sehingga mereka mampu keluar dari garis kemiskinan, sedangkan penduduk yang benar-benar miskin masih belum mampu untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus agar penduduk yang benar-benar miskin ini mampu mengangkat kondisi perekonomiannya.



Sumber: Badan Pusat Statisti, 2021

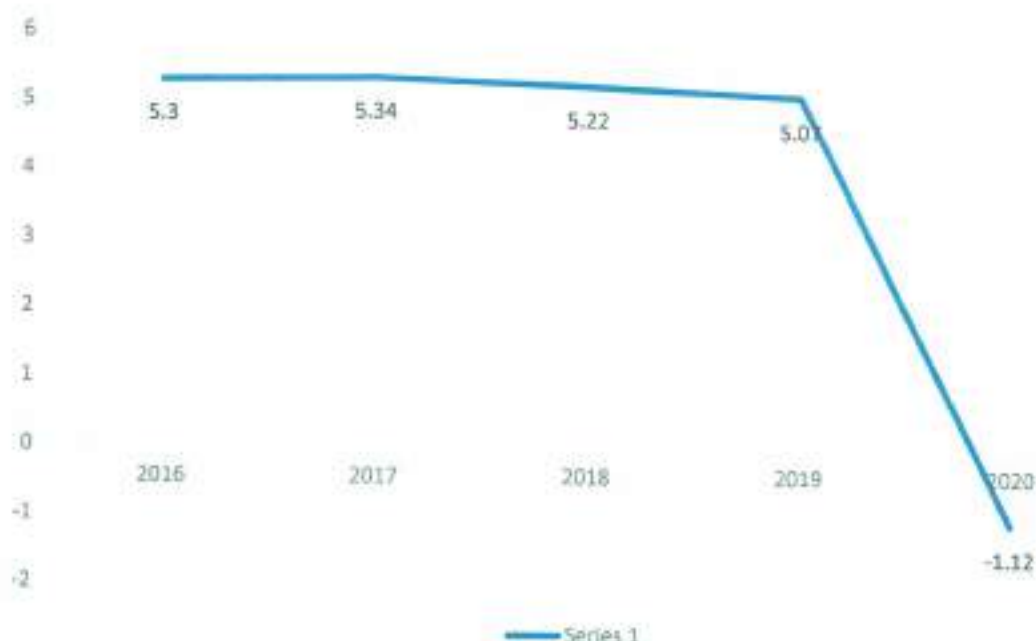
Grafik 3.2 Trend Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

3.2.2 Hubungan Kemiskinan Dengan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perhitungan, tercatat bahwa pada Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan, namun di Tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 5,04. Lebih lanjut di Tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,12 dikarenakan dari pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang berkontribusi paling tinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar lapangan usaha PDRB mengalami kontraksi kecuali terdapat 7 (tujuh) sektor lapangan usaha yang tetap tumbuh diantaranya sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *Real estate*, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib, Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Bahkan sektor informasi dan komunikasi, jasa Pendidikan dan jasa Kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya.

Sp



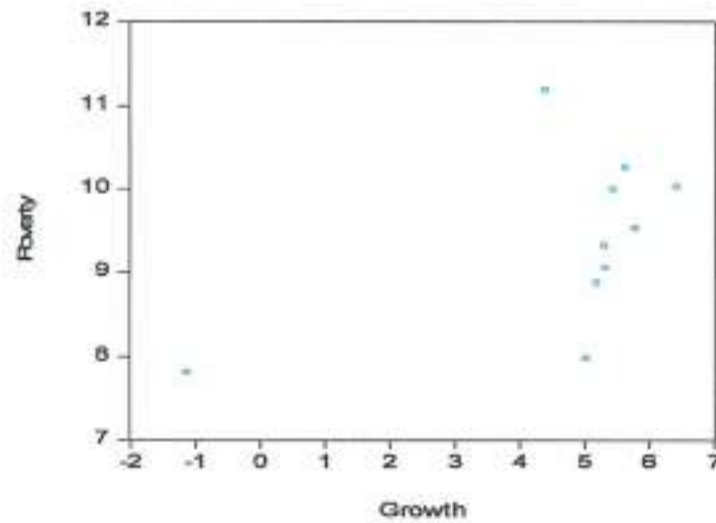
Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah), 2021

Grafik 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

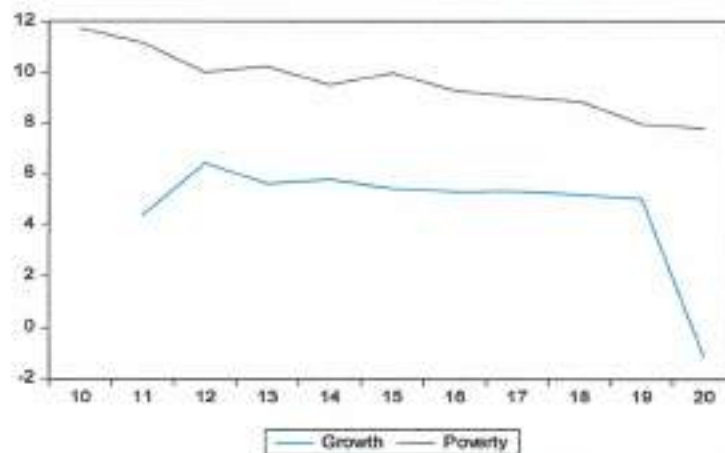
Dari analisis korelasi yang dilakukan, terlihat bahwa hubungan keeratan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Hal ini juga didukung dengan hasil pada grafik scatter plot yang tidak menunjukkan pola tertentu. Namun, secara intuitif, selama tahun 2010 hingga 2020, persentase kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara itu tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi

Tabel 3.1 Covarians Analysis Hubungan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan ekonomi

Correlation t-Statistic Probability Observations	POVERTY	GROWTH
POVERTY	1.000000 — — 10	
GROWTH	0.490909 1.593760 0.1497 10	1.000000 — — 10



Grafik 3.4 Scatter Plot Hubungan Kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi



Grafik 3.5 Perkembangan persentase kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi

2.4 Hubungan Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dari 3 (tiga dimensi dasar): pendidikan, kesehatan, perekonomian. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga berguna untuk IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.



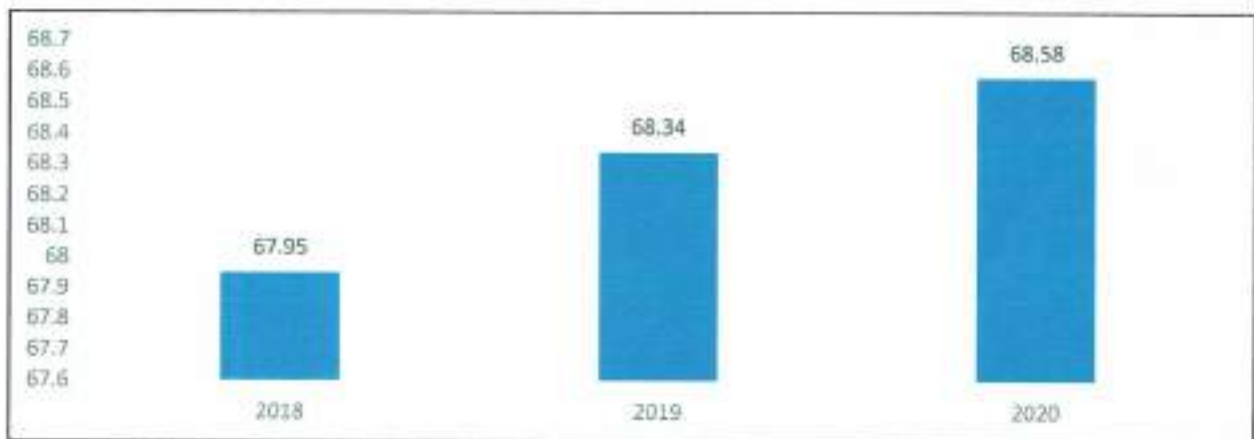
Sumber: BPS

Grafik 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Solok Tahun 2018 - 2020



Menurut BPS, IPM Kabupaten Solok pada tahun 2020 sebesar 69.08. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi pembangunan manusia di Kab. Solok pada tahun 2020 sudah berada di level Cukup dan perlu usaha ekstra dalam meningkatkan kualitas SDM di Kab. Solok. Dilihat dari peringkat IPM secara umum di Sumatera Barat di tahun 2020, IPM Kab. Solok berada pada peringkat 14 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar. Data BPS juga menunjukkan bahwa nilai IPM Sumatera Barat sudah berada pada level tinggi, sementara itu, IPM Kabupaten Solok masih berada pada kategori cukup.

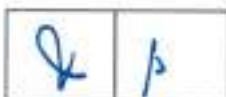
Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi wilayah secara garis besar. Semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kondisi status Kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Perhitungan angka harapan hidup menggunakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi maka harapan hidup juga akan rendah.

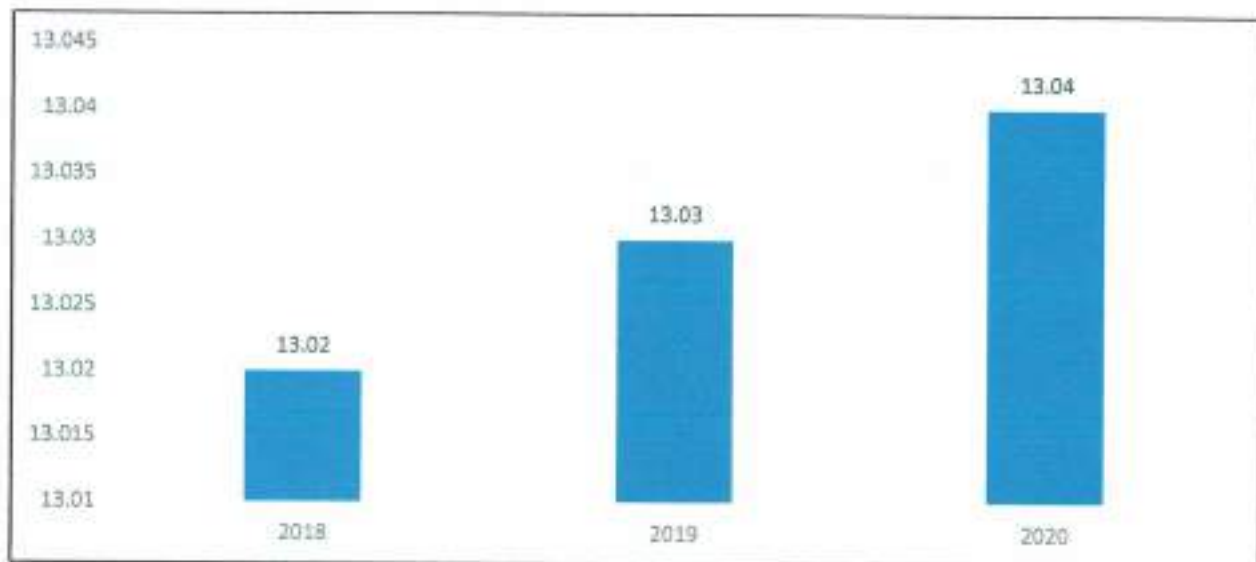


Sumber: BPS

Grafik 3.7 Umur Harapan Hidup (dalam tahun) Penduduk Kab. Solok tahun 2018 - 2020

Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok sudah mengalami peningkatan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Umur Harapan Hidup (*Expected Life Year*) yang meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat, pada tahun 2020, UHH Kabupaten Solok berada pada angka 68,58 tahun, artinya penduduk yang lahir pada tahun 2020 diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,58 tahun di Kabupaten Solok. Peningkatan UHH menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, seperti pelayanan rumah sakit, obat-obatan, dan bantuan persalinan sudah semakin baik. Namun, masih perlu ditingkatkan lagi, mengingat UHH Kabupaten Solok masih berada dibawah UHH Provinsi Sumbar, yaitu sebesar 69,47 tahun.

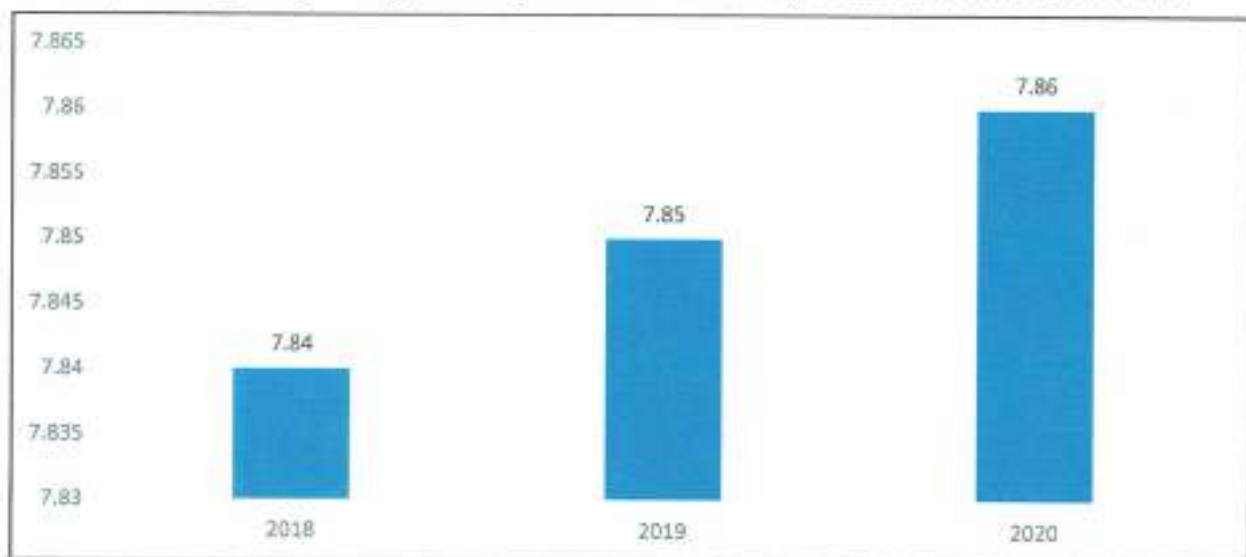




Sumber: BPS

Grafik 3.8 Harapan Lama Sekolah (dalam tahun) Kab. Solok tahun 2018 – 2020

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2020 adalah sebesar 13.04 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kabupaten Solok pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.04 tahun atau setara dengan Diploma II – Diploma III. HLS sudah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, meskipun peningkatannya masih relatif tipis dari tahun ke tahun.

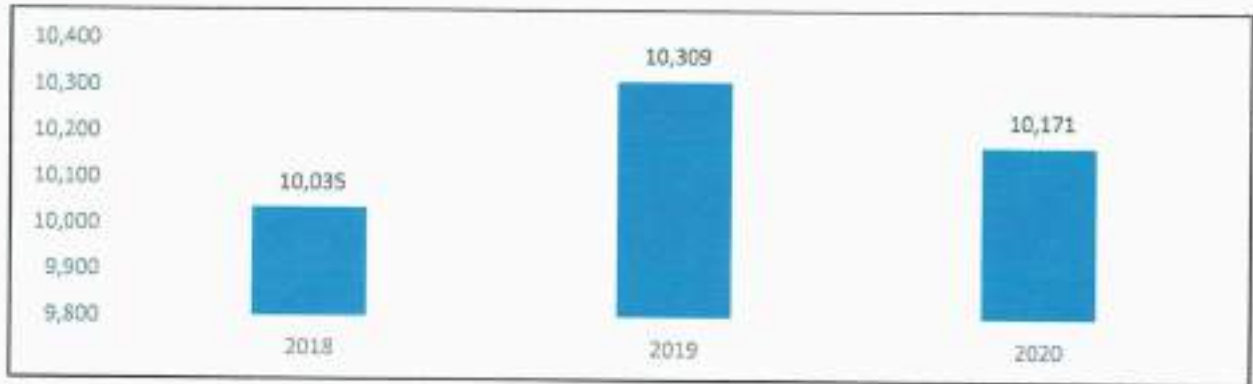


Sumber: BPS

Grafik 3.9 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kab. Solok tahun 2018 – 2020

Rata-rata lama sekolah penduduk Kab. Solok yang berusia 25 tahun ke atas adalah sebesar 7.86 tahun. Artinya, secara umum, tingkat pendidikan penduduk Kab. Solok masih sebatas lulus SD dan tidak sampai lulus SMP. Hal ini menjadi catatan penting pembangunan dalam bidang pendidikan karena RLS penduduk Kabupaten Solok masih relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumbar.





Sumber: BPS

Grafik 3.9 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kab. Solok (ribu rupiah/orang/tahun) 2018 - 2020

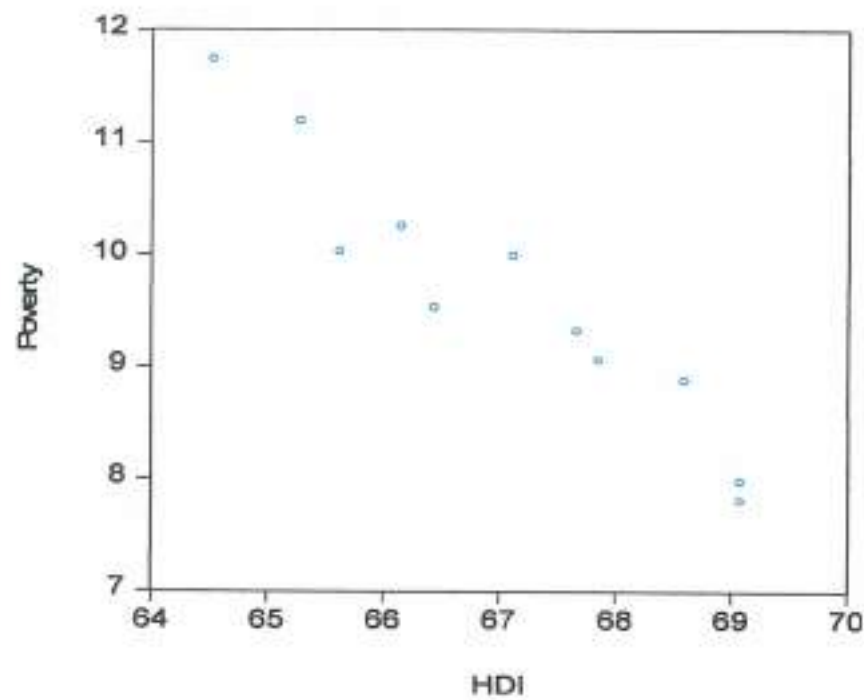
Indikator terakhir dalam penyusun IPM adalah pengeluaran per kapita disesuaikan (daya beli/*Purchasing Power Parity*). Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Berdasarkan gambar 7, terlihat bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat sebesar Rp10.171,- dan relatif rendah dibandingkan tahun 2019. Artinya, daya beli masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara persentase kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disajikan dalam tabel korelasi. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat signifikan dengan arah berlawanan. Dengan kata lain, semakin tinggi IPM, semakin rendah persentase penduduk miskin. Secara visual, hasil ini digambarkan pada grafik *scatter plot* dan grafik perkembangan dimana hubungannya berbanding terbalik.

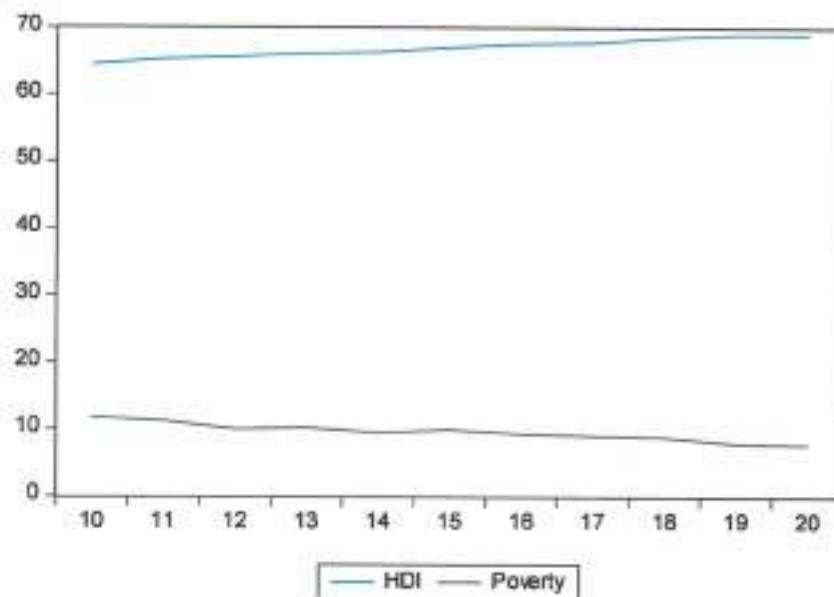
Tabel 3.2 Covarians Analysis Hubungan Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Correlation t-Statistic Probability Observations	HDI	POVERTY
HDI	1.000000 ----- ----- 11	
POVERTY	-0.979501 -14.58768 0.0000 11	1.000000 ----- ----- 11

g f



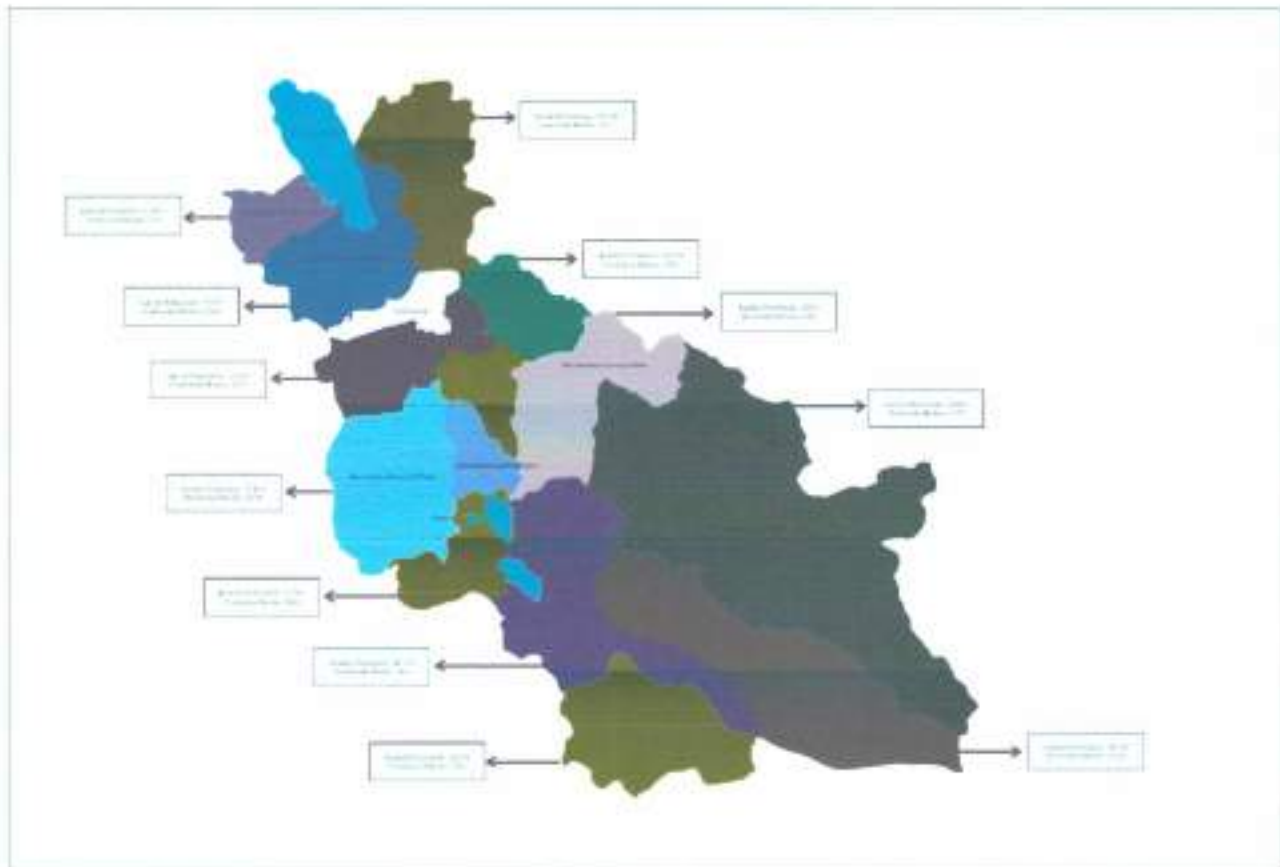
Grafik 3.10 Scatter Plot Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia



Grafik 3.11 Perkembangan persentase kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

3.3 Prioritas Intervensi

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu diketahui sebaran penduduk miskin di Kabupaten Solok.



Gambar 3.1 Peta sebaran penduduk miskin Kabupaten Solok

Gambar diatas memperlihatkan bahwa penduduk miskin tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Solok. Dikarenakan dampak kemiskinan bersifat multi dimensi diperlukan strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang komprehensif dan lintas sector supaya strategi dan kebijakan yang didisusun menjaditepat sasaran.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Rumah tangga dalam data DTKS dikelompokkan kedalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga. DTKS hanya berisikan kelompok rumah tangga desil1, desil 2, desil 3 dan desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling rendah.

Pengelompokan desil rumah tangga 40% terbawah dalam DTKS

1. Desil 1 (Sangat Miskin)

Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. Kelompok

rumah tangga ini berhak menerima bantuan program pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS)

2. Desil 2 (Miskin)

Rumah tangga yang masuk kedalam kelompok 11-20% dihitung secara nasional. Kelompok rumah tangga ini berhak menerima bantuan program pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS)

3. Desil 3 (Hampir Miskin)

Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30% dihitung secara nasional. Kelompok rumah tangga ini berhak menerima bantuan program pemerintah berupa Beras untuk keluarga miskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

4. Desil 4 (Rentan Miskin)

Rumah tangga yang masuk kedalam kelompok 30-40% dihitung secara nasional. Kelompok rumah tangga ini berhak menerima bantuan program pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kegunaan Data DTKS

1. Untuk analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan
2. Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial

Kelompok rumah tangga yang termasuk kedalam desil 1 sampai dengan desil 4 per nagari di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Q	P
---	---

Tabel 3.3 Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Solok Berdasarkan Desil Tahun 2020

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
	KECAMATAN X KOTO DIATAS	180	3,05	442	7,48	761	12,88	717	12,13	2.123	5.909
1	Nagari Paninjauan	21	3,17	41	6,19	95	14,35	63	9,52	244	662
2	Nagari Siberambang	32	4,60	76	10,92	100	14,37	84	12,07	322	696
3	Nagari Pasilihan	2	0,98	15	7,35	30	14,71	45	22,06	115	204
4	Nagari Bukik Kandung	10	1,81	48	8,70	74	13,41	97	17,57	253	552
5	Nagari Tanjung Balik	25	3,26	61	7,96	104	13,58	92	12,01	307	766
6	Nagari Katialo	19	7,20	43	16,29	47	17,80	50	18,94	200	264
7	Nagari Kuncir	2	0,71	13	4,59	33	11,66	35	12,37	100	283
8	Nagari Labuah Panjang	5	2,17	15	6,52	40	17,39	41	17,83	127	230

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
9	Nagari Sulit Air	64	2,84	130	5,77	238	10,57	210	9,33	661	2.252
KECAMATAN X KOTO SINGKARAK		161	1,53	540	5,14	968	9,21	879	8,37	2.564	10.507
10	Nagari Tanjung Alai	26	4,40	79	13,37	92	15,57	57	9,64	287	591
11	Nagari Tikalak	1	0,20	25	4,96	41	8,13	44	8,73	124	504
12	Nagari Saniang Baka	46	3,15	102	6,98	163	11,16	154	10,54	486	1.461
13	Nagari Aripin	6	0,41	43	2,97	83	5,72	83	5,72	224	1.450
14	Nagari Koto Sani	42	1,77	131	5,51	241	10,13	170	7,15	601	2.378
15	Nagari Sumani	8	0,46	46	2,65	159	9,17	186	10,73	411	1.734
16	Nagari Singkarak	14	1,01	55	3,97	80	5,78	70	5,06	230	1.384
17	Nagari kacang	18	1,79	59	5,87	109	10,85	115	11,44	320	1.005
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH		85	2,35	270	7,45	293	8,09	244	6,73	910	3.623

21

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
18	Nagari Muaro Pingai	10	1,66	32	5,32	75	12,46	71	11,79	207	602
19	Nagari paninggahan	75	2,48	238	7,88	218	7,22	173	5,73	722	3.021
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI		53	1,59	233	6,98	336	10,06	350	10,48	991	3.339
20	Nagari Koto Laweh	7	5,88	32	26,89	29	24,37	21	17,65	146	119
21	Nagari Sungai Jambur	2	0,50	31	7,67	38	9,41	49	12,13	138	404
22	Nagari Bukik Bais	4	1,77	16	7,08	36	15,93	26	11,50	107	226
23	Nagari Sungai Durian	1	0,43	18	7,83	33	14,35	15	6,52	90	230
24	Nagari Guguak Sarai	13	2,36	32	5,81	49	8,89	55	9,98	166	551

2 p

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
25	Nagari Siaro- aro	-	-	6	6,38	8	8,51	8	8,51	37	94
26	Nagari indudur	-	-	6	3,02	25	12,56	22	11,06	69	199
27	Nagari Taruang- taruang	6	0,79	34	4,49	50	6,60	57	7,52	159	758
28	Nagari Pianggu	20	2,64	58	7,65	68	8,97	97	12,80	262	758
KECAMATAN BUKIT SUNDI		75	0,94	335	4,20	674	8,45	659	8,27	1.757	7.972
29	Nagari Dilam	6	0,52	93	8,00	166	14,29	111	9,55	399	1.162
30	Nagari Parambahan	1	0,20	18	3,69	44	9,02	47	9,63	123	488
31	Nagari kinari	35	2,48	75	5,31	147	10,40	138	9,77	413	1.413
32	Nagari Muaro Paneh	33	0,77	138	3,23	284	6,65	322	7,54	788	4.271
33	Nagari Bukit Tandang	-	-	11	1,72	33	5,17	41	6,43	92	638

21

No	Kecamatan / Nagari	DESIL 1	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
	KECAMATAN LEMBANG JAYA	206	2,43	763	9,01	1.008	11,91	671	7,93	2.671	8.464
34	Nagari Koto Laweh	52	3,36	140	9,06	148	9,57	103	6,66	465	1.546
35	Nagari batu Banyak	29	4,49	71	10,99	127	19,66	106	16,41	368	646
36	Nagari Koto Gadang Koto Anau	61	2,41	241	9,51	223	8,80	158	6,24	704	2.533
37	Nagari Limau Lunggo	17	2,22	73	9,52	107	13,95	56	7,30	279	767
38	Nagari Batu Bajanjang	22	1,49	129	8,76	239	16,23	162	11,00	578	1.473
39	Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh	25	1,67	109	7,27	164	10,94	86	5,74	404	1.499

21

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	22	0,76	159	5,52	360	12,50	313	10,87	873	2.879
40	Nagari Sirukam	16	0,89	92	5,14	166	9,28	150	8,38	439	1.789
41	Nagari Supayang	2	0,27	30	4,09	138	18,83	139	18,96	332	733
42	Nagari Aie Luo	4	1,12	37	10,36	56	15,69	24	6,72	148	357
	KECAMATAN TIGO LURAH	256	8,02	415	13,01	574	17,99	369	11,56	1.653	3.191
43	Nagari Rangkiang Luluih	34	4,89	129	18,53	124	17,82	88	12,64	416	696
44	Nagari Batu Bajanjang	69	6,91	133	13,33	179	17,94	99	9,92	518	998
45	Nagari Simanau	5	1,20	30	7,23	63	15,18	49	11,81	171	415
46	Nagari Tanjung Balik Sumiso	49	10,40	94	19,96	105	22,29	59	12,53	360	471

24

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
47	Nagari Garabak Data	99	16,20	29	4,75	103	16,86	74	12,11	343	611
	KECAMATAN KUBUNG	144	0,81	631	3,53	1.494	8,36	1.218	6,82	3.500	17.867
48	Nagari Koto Baru	29	0,46	142	2,26	311	4,95	398	6,34	888	6.280
49	Nagari Selayo	41	0,94	132	3,02	514	11,74	232	5,30	935	4.377
50	Nagari Panyakalan	6	0,42	32	2,23	82	5,70	99	6,88	227	1.438
51	Nagari Saok Laweh	12	0,74	63	3,89	147	9,08	96	5,93	332	1.619
52	Nagari gantung Ciri	30	1,88	123	7,69	178	11,13	130	8,13	482	1.600
53	Nagari Koto Hilalang	14	1,49	69	7,36	118	12,58	101	10,77	323	938
54	Nagari Tanjung Bingkung	9	0,87	51	4,93	103	9,96	101	9,77	280	1.034

8 f

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
55	Nagari Gaung	3	0,52	19	3,27	41	7,06	61	10,50	135	581
KECAMATAN GUNUNG TALANG		203	1,26	789	4,88	1.393	8,62	1.256	7,77	3.656	16.167
56	Nagari Aie Batumbuk	40	4,52	145	16,40	148	16,74	92	10,41	463	884
57	Nagari Koto Gack Guguk	3	0,36	22	2,61	68	8,07	66	7,83	170	843
58	Nagari Koto Gadang Guguk	17	0,81	85	4,06	190	9,08	194	9,27	500	2.092
59	Nagari Batang Barus	68	2,66	146	5,71	192	7,51	172	6,73	594	2.556
60	Nagari Jawi- jawi Guguk	8	0,77	19	1,84	97	9,38	116	11,22	252	1.034
61	Nagari Sungai Janiah	1	0,16	19	3,04	70	11,20	70	11,20	174	625
62	Nagari Talang	24	0,84	109	3,82	215	7,53	237	8,30	597	2.857
63	Nagari Cupak	42	0,80	244	4,62	413	7,83	309	5,86	1.021	5.276

21

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
	KECAMATAN DANAU KEMBAR	148	2,32	489	7,68	707	11,10	376	5,90	1.741	6.369
64	Nagari Simpang Tanjung Nan IV	87	3,17	203	7,39	335	12,20	185	6,74	833	2.746
65	Nagari Kampung Dalam	61	1,68	286	7,89	372	10,27	191	5,27	930	3.623
	KECAMATAN LEMBAH GUMANTI	267	1,56	1.011	5,90	1.608	9,38	1.090	6,36	3.993	17.138
66	Nagari Aie Dingin	87	2,91	234	7,84	300	10,05	160	5,36	802	2.985
67	Nagari Salimpat	27	1,21	118	5,30	199	8,94	147	6,60	506	2.227
68	Nagari Alahan Panjang	77	1,35	278	4,89	495	8,70	335	5,89	1.200	5.688
69	Nagari Sungai Nanam	76	1,22	381	6,11	614	9,84	448	7,18	1.536	6.238

No	Kecamatan / Nagari	DESIL I	Persentase	DESIL 2	Persentase	DESIL 3	Persentase	DESIL 4	Persentase	Total	Jumlah KK
	KECAMATAN HILIRAN GUMANTI	306	6,11	630	12,57	657	13,11	474	9,46	2.099	5.010
70	Nagari Sungai Abu	80	10,34	140	18,09	112	14,47	55	7,11	430	774
71	Nagari Talang Babungo	81	3,18	202	7,92	277	10,86	220	8,63	802	2.550
72	Nagari Sariak Alahan Tigo	145	8,60	288	17,08	268	15,90	199	11,80	942	1.686
	KECAMATAN PANTAI CERMIN	178	2,70	554	8,41	700	10,62	494	7,50	1.948	6.589
73	Nagari Surian	139	7,41	387	20,64	478	25,49	324	17,28	1.382	1.875
74	Nagari Lolo	39	0,83	167	3,54	222	4,71	170	3,61	607	4.714
	JUMLAH KESELURUHAN	2.284	1,99	7.261	6,31	11.533	10,03	9.110	7,92	30.206	115.024

21

Dari tabel diatas diketahui bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Solok paling banyak berada pada desil 3 atau kelompok hampir miskin (10,03%). Sementara untuk masyarakat sangat miskin (Desil 1) merupakan kelompok dengan persentase paling sedikit (1,99%).

Berdasarkan identifikasi masalah dan sebaran data penduduk miskin menurut DTKS maka prioritas intervensi yang akan dilakukan dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Selain itu untuk intervensi prioritas juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Sebagai upaya tindak lanjut dari latar belakang kondisi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya termasuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan kedalam Arah Kebijakan Umum APBD pada tahun 2016-2021. Hasilnya, dari 9,32% penduduk miskin Kabupaten Solok pada tahun 2016, berkurang menjadi 7,81% ditahun 2021. Ada tiga hipotesis yang dapat dirumuskan, pertama: bahwa terjadinya pengurangan kemiskinan hanya bergantung dari upaya Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan penanggulangan kemiskinan pada arah kebijakan pembangunan daerahnya, kedua: upaya yang dilakukan tidak tepat sasaran/tidak relevan dengan kondisi kemiskinan masyarakat, dan ketiga: upaya yang dilakukan hanya mengangkat kemiskinan dalam jangka pendek (cash programme) oleh karena tidak memberdayakan fakir miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan secara mandiri.

4.1 Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2021-2024 langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut :

***"Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok
Terbaik di Sumatera Barat"***

Misi pembangunan Kabupaten Solok 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
6. Meningkatkan Tatahidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Dari keenam misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 misi keempat tidak terkait langsung dalam hal penanggulangan kemiskinan karena misi 4 lebih fokus ke pelayanan publik dan peningkatan kinerja internal perangkat daerah. Sementara misi yang

terkait langsung dengan indikator kemiskinan berada pada misi 5. Sedangkan untuk melihat tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada Tabel. 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran		Strategi	
Misi 1: Pengelolaan Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat				
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Yang Responsif	1	Meningkatnya Anggaran Berbasis kebutuhan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan				
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang
			2	Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tata ruang
	2	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang Berkeadilan, Berkualitas dan Terintegrasi dengan Sektor Unggulan	1	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk infrastruktur publik
			2	Menyediakan sarana (peralatan) pemeliharaan jalan, mendukung sektor unggulan dan penanganan bencana alam
			3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan Mantap sampai ke daerah terisolir/tertinggal
			4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi
			5	Meningkatkan layanan air bersih yang terlindungi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		6 Meningkatkan layanan sanitasi yang layak
		7 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
		8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung pemerintahan
	3 Meningkatkan Kondisi	1 Meningkatkan kuantitas rumah layak huni
	Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Nyaman, Berkualitas dan Berkelanjutan	2 Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana permukiman
		3 Menurunkan luas kawasan kumuh
		4 Meningkatkan perbaikan rumah terdampak bencana
	4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)
		2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
		3 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan
		4 Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah B3
	5 Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	1 Meningkatkan penyediaan Dokumen Analisa Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana
		2 Meningkatkan mitigasi bencana

Tujuan	Sasaran		Strategi	
			3	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana
			4	Meningkatkan penanganan pasca bencana
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan Dan Pariwisata				
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Meningkatkan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan
			2	Meningkatkan daya saing industri kecil menengah berbasis Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan
			3	Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
			4	Meningkatkan daya saing pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf)
			5	Meningkatkan produk unggulan lokal daerah
			6	Mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif
			7	Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
			8	Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bada Usaha Milik Nagari (BUMNAG), dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BAKN)

Tujuan	Sasaran		Strategi	
			9	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif
	2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Peningkatan kesempatan kerja
			2	Meningkatkan keterampilan/Kompetensi angkatan kerja
			3	Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan formal, non formal, dan informal
			2	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan
	2	Meningkatnya Mutu Pendidikan; Merata dan Berkeadilan	1	Membangun Gerakan Solok Bangkit Menjadi yang Terbaik
			2	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan
			3	Meningkatkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah dan Non pemerintah
			4	Mempercepat Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		5 Meningkatkan Pembinaan Prestasi dan Daya Saing Sekolah 6 Meningkatkan pemerataan ketersediaan guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan
	3	1 Mengoptimalkan Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Agama, Tahfidz Qur'an, dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) 2 Melibatkan Lembaga Keagamaan seperti MUI, BAZ dan Lembaga Adat seperti LKAAM dan KAN dalam Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran Agama dan ABS-SBK Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penguatan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai-nilai Pancasila dengan Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal dan Organisasi terkait 3 Membangun lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar

Tujuan	Sasaran	Strategi
		4 Memfasilitasi keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak
	4 Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan
	5 Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	1 Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan
		2 Meningkatkan penyelenggaraan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional
		3 Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan
		4 Mengembangkan Program Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Pemuda
	6 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat, perseorangan, dan rujukan
		2 Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
		3 Meningkatkan sistem kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi pada masa pandemic

Tujuan	Sasaran		Strategi	
			4	Memperkuat tata kelola manajemen kesehatan
	7	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif	1	Mengurangi kesenjangan gender melalui pengarusutamaan gender disegala bidang pembangunan
			2	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak
			3	Meningkatkan akses penyelenggaraan KBKR secara komprehensif
			4	Memperkuat kebijakan pengendalian penduduk
	8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin
Misi 6 : Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)				
Mewujudkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat	1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatkan ilmu pengetahuan dan implementasi nilai-nilai agama
			2	Meningkatkan ilmu pengetahuan dan implementasi nilai-nilai adat dan budaya
	2	Meningkatnya ketahanan Sosial dan kesejahteraan masyarakat Nagari	1	Meningkatkan Pembangunan di Nagari yang Berkelanjutan pada aspek ekonomi Sosial dan Lingkungan

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

4.2.1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

1. meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan terhadap layanan internet bagi masyarakat miskin;
2. menyukseskan progam KB dalam rangka mengendalikan jumlah anggota keluarga;
3. mengimplementasikan peraturan daerah tentang larangan merokok;
4. pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari (TOGA dan TADAGA);
5. penyediaan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu/beasiswa miskin;
6. penyediaan subsidi listrik;
7. bantuan rumah tidak layak huni;
8. penyediaan transportasi untuk anak sekolah bagi masyarakat miskin;
9. optimalisasi pemberian raskin agar tepat sasaran;
10. pelaksanaan pasar murah;
11. menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin;
12. penyediaan bantuan untuk lansia;
13. optimalisasi program bantuan janda dan lansia miskin;
14. mendorong pengembangan sistem jaminan sosial; dan
15. peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar.

4.2.2 Peningkatan Kemampuan dan pendapatan Masyarakat

1. meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan; PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS dalam upaya peningkatan sumber daya masyarakat miskin;
2. peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
3. mendorong peningkatan efektifitas peran masyarakat dalam memajukan pendidikan masyarakat miskin;
4. mendorong pengembangan sistem jaminan sosial;
5. memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel upaya peningkatan sumberdaya masyarakat miskin;
6. meningkatkan program pembinaan prestasi, minat bakat dan

- daya saing peserta didik yang masuk dalam kategori masyarakat miskin;
7. menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar;
 8. menyusun regulasi daerah terkait suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar;
 9. mendorong keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak;
 10. mengoptimalkan layanan perpustakaan untuk peningkatan sumberdaya masyarakat;
 11. meningkatkan pembinaan olahraga prestasi khususnya pada masyarakat;
 12. meningkatkan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional;
 13. meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
 14. meningkatkan kerjasama sinkronisasi program pembinaan dan pemandirian pemuda dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 15. meningkatkan program kemandirian, kreativitas dan daya saing pemuda melalui program wirausaha pemuda, taruna tani, dan lain-lain;
 16. meningkatkan promosi kesehatan masyarakat;
 17. mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat;
 18. meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
 19. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin;
 20. mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang menjangkau masyarakat miskin;
 21. membangun dan memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi masyarakat miskin;
 22. meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan dengan perhitungan yang tepat dan sesuai kebutuhan program;

23. meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak;
24. optimalisasi pencegahan dan penanganan perlindungan anak
25. meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui penerapan 8 fungsi keluarga;
26. meningkatkan kapasitas pelayanan dan jangkauan KBKR
27. meningkatkan kemandirian PUS dalam ber-KB;
28. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki;
29. mengoptimalkan pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter;
30. perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan;
31. peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin;
32. penyediaan benih/bibit unggul, sarana dan prasarana produksi;
33. peningkatan kapasitas SDM pertanian dan penguatan kelembagaan;
34. perlindungan lahan pertanian;
35. penyediaan sarana dan prasarana panen dan pasca panen;
36. peningkatan teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran
37. pengembangan pertanian organik;
38. pengembangan usaha dan diversifikasi produk industri kecil menengah (IKM);
39. peningkatan kapasitas sdm industri kecil menengah (IKM);
40. pemanfaatan digitalisasi untuk IKM;
41. peningkatan akses informasi dan kemitraan bagi IKM;
42. mendorong pertumbuhan ikm termasuk *millenial enterpreuner* dan *women enterpreuner*
43. mendorong pertumbuhan sentra-sentra IKM potensial;
44. penyediaan sarana dan prasarana sentra IKM;
45. peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi baik dari segi kelembagaan maupun SDM koperasi;
46. pemberdayaan dan promosi usaha pariwisata (memperkuat *branding*) dan ekonomi kreatif;
47. pengembangan destinasi wisata pada kawasan strategis,

48. peningkatan SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
49. peningkatan produktivitas melalui keterampilan pelaku usaha pariwisata dan inovasi produk ekonomi kreatif;
50. perluasan kesempatan investasi untuk kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
51. revitalisasi kemitraan masyarakat dan profesional untuk CHSE;
52. pemasaran berbasis digital dan *marketplace*;
53. peningkatan sarana dan prasarana pasar;
54. peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan;
55. mendorong digitalisasi sektor perdagangan;
56. peningkatan akses informasi perdagangan;
57. peningkatan promosi perdagangan dalam negeri dan atau luar negeri;
58. penyediaan dan pemenuhan ketahanan pangan;
59. peningkatan akses dan keterjangkauan pangan;
60. peningkatan keamanan pangan;
61. penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal;
62. peyusunan regulasi dokumen rencana tenaga kerja daerah (RTKD);
63. penguatan kerjasama (MoU) dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan perusahaan penerima kerja;
64. optimalisasi penggunaan sistem informasi pasar kerja berbasis teknologi;
65. peningkatan fasilitasi program magang kerja dalam dan luar negeri;
66. mengoptimalkan *Skil Development Center* (SDC);
67. mendorong wirausaha baru melalui inkubasi bisnis/tenaga kerja mandiri (TKM);
68. mendorong terciptanya lapangan kerja baru berbasis padat karya;
69. pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan;
70. optimalisasi angkatan kerja antar daerah (AKAD) dan angkatan

Kerja Antar Negara (AKAN);

71. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
72. penyediaan sarana dan prasarana BLK;
73. peningkatan Kualitas dan kuantitas Instruktur;
74. pengoptimalan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), BLK Komunitas; dan
75. pendorong pembangunan infrastruktur secara padat Karya;

4.2.3 Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil

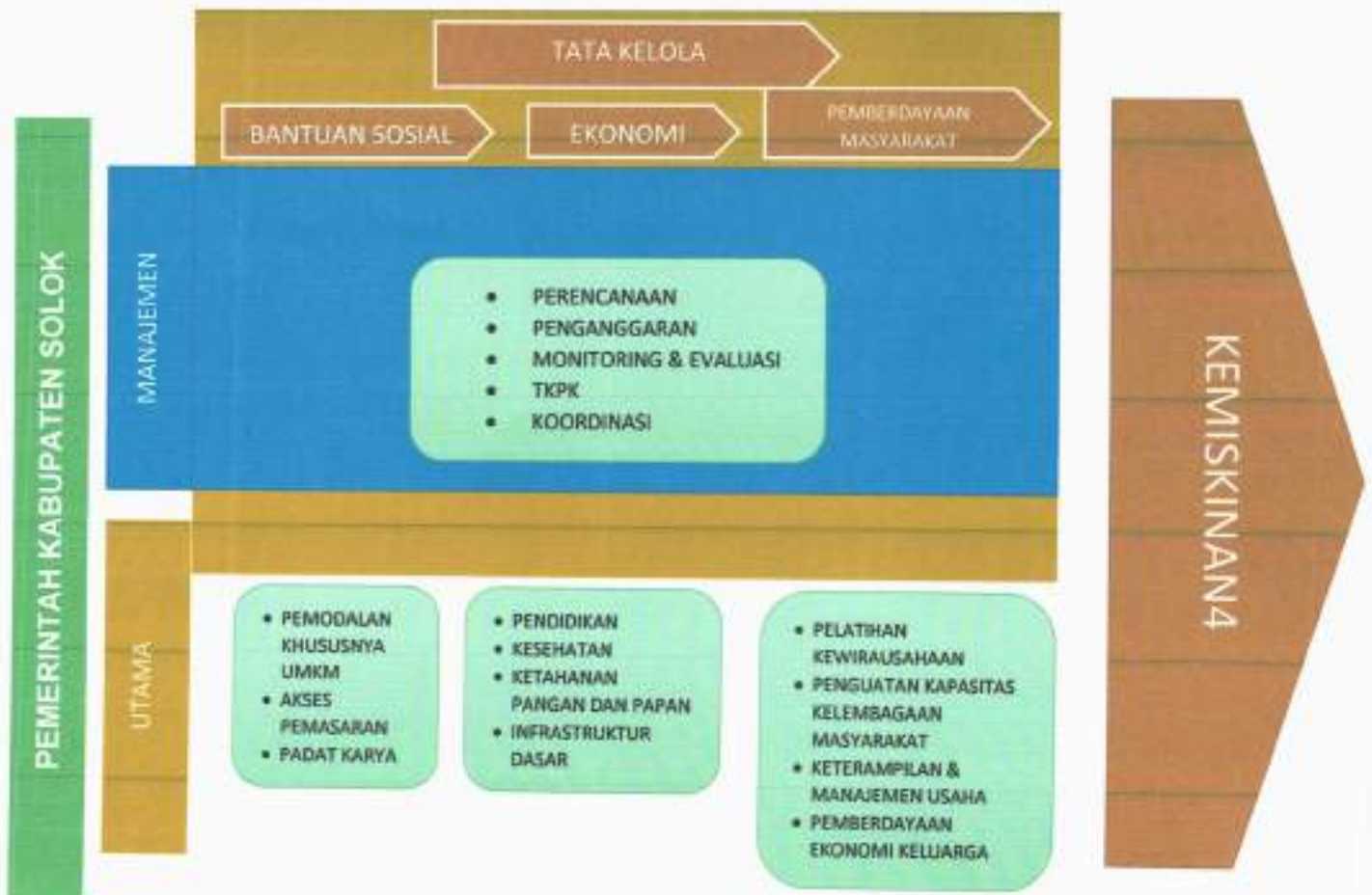
1. peningkatan Pembinaan dan Pengawasan koperasi baik dari segi kelembagaan maupun SDM Koperasi;
2. pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM;
3. peningkatan kapasitas usaha dan SDM UMKM;
4. pemanfaatan digitalisasi untuk UMKM;
5. peningkatan Akses Informasi dan Kemitraan bagi UMKM; dan
6. mendorong penumbuhan usaha mikro dan kecil termasuk *millenial enterpreuner* dan *women enterpreuner*;

4.2.4 Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

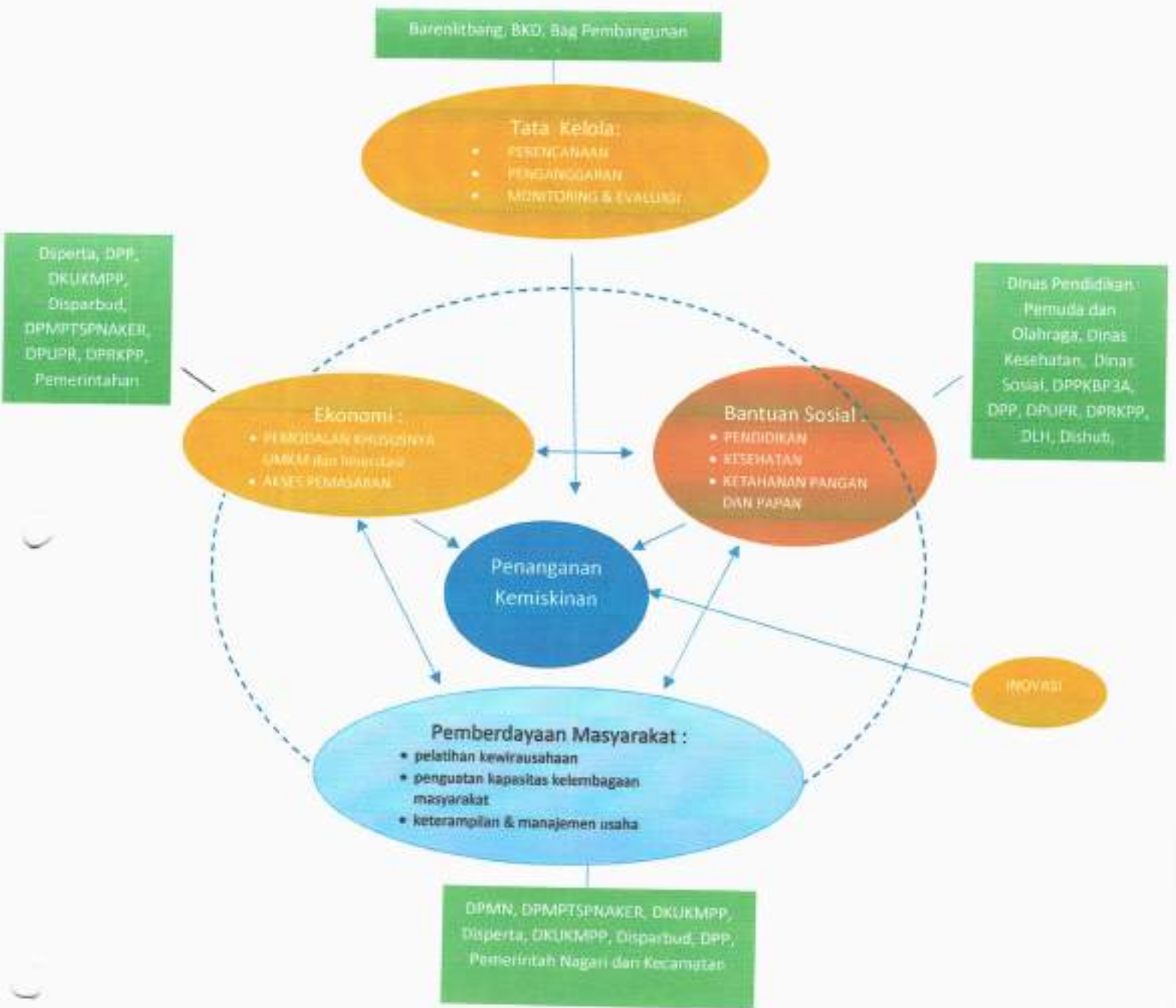
1. meningkatkan kualitas basis data terpadu (DTKS/Data terpadu kesejahteraan Sosial);
2. penguatan kelembagaan (TKPK Daerah/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah); dan
3. meningkat koordinasi antar *stakeholder* penanggulangan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.3 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Proses bisnis dalam upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4. 1 Proses Bisnis Level 1



Gambar 4. 2 Tata kelola penanganan kemiskinan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

5.1 Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu

Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu memiliki tujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial.

Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan dkk.; 2000). Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka.

Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan agenda pekerjaan yang layak (ILO, 2012) . Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Arah kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif di Indonesia menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian.

Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai



kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Efektivitas bantuan sosial (review kriteria, sasaran, paket manfaat, monev) Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial Yang terintegratif Pengembangan sistem layanan sosial terpadu di daerah: updating BDT secara reguler, pengaduan dan pelayanan terintegrasi Penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, jejaring kerja, dan good governance Peningkatan kompetensi pekerja sosial/pendamping & standarisasi layanan lembaga kesejahteraan sosial 8 elemen, yakni penyediaan, tindakan pencegahan, tindakan promotif, serta peran transformatif.

Elemen penyediaan mencakup program jejaring pengaman yang tertarget. Elemen tindakan pencegahan mencakup tindakan manajemen risiko sosial untuk rumah tangga yang tergolong rentan. Elemen promotif mencakup seluruh intervensi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kapabilitas setiap penduduk. Sedangkan elemen transformatif mencakup tindakan-tindakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan untuk mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Bantuan Sosial Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (in-cash transfers), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (in-kind transfers). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar.

Manfaat diberikan seperti program jaminan sosial, namun tanpa menggunakan skema asuransi sosial dan tanpa membutuhkan pembayaran atau kontribusi dari penerima manfaatnya (Adema, 2006). Jaminan Sosial Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, serta kematian. ILO menggambarkan jaminan sosial sebagai sebuah mekanisme penggabungan risiko finansial. Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme risk sharing dalam suatu kelompok

penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, dimana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. Dengan kata lain, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. Jaminan sosial secara umum mensyaratkan bahwa para peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi. Berdasarkan hal tersebut diatas didukung oleh program pada tabel 5.1 (Lampiran).

Tabel 5.1
Program Prioritas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja	Pemerintah Daerah Penanggung Jawab		
				2023		2024		2025		2026					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
A.	Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu														
1.	URUGAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01.	URUGAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	97,88 %	98 %	130,000,000,000	98,25 %	135,473,000,000	98,50 %	145,105,130,300	98,75 %	155,451,126,090	99 %	166,550,336,493	99 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1.02.	URUGAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat	3,44 Indeks	3,49	84,081,358,950	3,54	87,621,164,162	3,59	93,851,050,356	3,64	100,542,630,246	3,69	107,721,374,046	3,69	Dinas Kesehatan
1.03.	URUGAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKURAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	78,27 %	79,27 %	7,680,887,000	80,27 %	8,013,631,243	82,27 %	8,583,409,424	84,27 %	9,195,396,874	86,27 %	9,851,948,211	86,27 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	45 %	50 %	1,125,383,000	55 %	1,172,761,624	60 %	1,256,144,976	65 %	1,345,708,113	70 %	1,441,791,672	70 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	70,27 %	71,27 %	3,019,963,000	73,27 %	4,084,993,442	73,37 %	4,375,436,476	75,27 %	4,687,405,097	77,27 %	5,022,085,821	77,27 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.	URUGAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														

8 1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Klasik Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Kondisi Klasik Akhir	Perangkat Daerah
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni	100 %	664,158,350	100 %	692,119,416	100 %	741,329,107	100 %	794,185,872	100 %	850,890,743	100 %	Jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan Dan Perumahan	
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Perumahan Yang Tertata	14 %	5,000,000,000	35 %	5,210,500,000	45 %	5,380,966,550	55 %	5,978,889,465	65 %	6,405,782,173	65 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan Dan Perumahan	
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencapaian Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	8,5 %	4,038,902,460	2,92 %	4,308,940,254	3,02 %	4,508,195,906	3,12 %	4,830,630,274	3,22 %	5,174,465,875	3,22 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan Dan Perumahan	
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60 %	533,150,117	65 %	555,595,736	70 %	595,096,593	75 %	637,520,123	80 %	683,048,703	80 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan Dan Perumahan	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BERDASAR KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM SERTA PERLINDUNG MASYARAKAT														
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertarikan ketertarikan umum masyarakat kalah/ada	100 %	634,699,100	100 %	661,419,922	100 %	708,446,889	100 %	758,959,152	100 %	813,148,836	100 %	Satuan Polisi Pasang Praga Dan Pemadam Kebakaran	
1.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Peningkatan dan Kecelakaan	100 %	3,231,577,400	100 %	2,617,314,899	100 %	2,803,405,891	100 %	3,003,268,731	100 %	3,217,723,547	100 %	Badan Peningkatan Bencana Daerah	

2 1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kewangkaan Pelaksanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022			2023			2024			2025			Kondisi Kinerja
				target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp		
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KERAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KERAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	341,757,500		100 %	356,145,491		100 %	381,467,435		100 %	408,666,063		100 % Satuan Polisi Penangr Praga Dan Pemadam Kebakaran
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BERANG SOSIAL															
1.06.02.	PROGRAM PENGHEBAYAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dihantar panti	100 %	100 %	177,076,300		100 %	184,531,421		100 %	197,651,605		100 %	211,744,164		100 % Dinas Sosial
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	96,98 %	96,73 %	924,353,015		97,48 %	963,265,277		98,23 %	1,031,756,651		98,98 %	1,105,300,901		99,72 % Dinas Sosial
1.06.05.	PROGRAM PESINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	100 %	100 %	608,943,300		100 %	634,580,021		100 %	679,698,661		100 %	728,161,175		100 % Dinas Sosial
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	100 %	511,128,450		100 %	532,646,958		100 %	570,518,156		100 %	611,196,101		100 % Dinas Sosial
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WADY YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAHAR															
2.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BERANG PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															

21

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan kelompok kegiatan yang Melakukan Pendidikan Keluarga melalui 8 Pangkal Keluarga	100 %	58,907,300	100 %	61,387,506	100 %	65,752,157	100 %	70,440,286	100 %	75,469,723	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan Dan Perencanaan Perencanaan	
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	14.30 %	28.60 %	243,503,750	42.90 %	253,737,342	60 %	271,799,489	78.60 %	291,178,792	100 %	311,968,958	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	Persentase kegiatan penghapusan Limbah BB yang diawasi	7.70 %	26.20 %	25,000,000	44.60 %	26,052,500	63.10 %	27,904,832	81.60 %	29,894,447	100 %	32,028,910	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan dan penilaian rutin setelah Adiwiyata	11.11 %	24.44 %	27,140,000	40.00 %	28,262,594	57.77 %	30,293,485	77.78 %	32,453,412	100 %	34,770,585	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.	PROGRAM PENGARAHAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	100 %	100 %	15,075,000	100 %	15,709,657	100 %	16,826,614	100 %	18,026,351	100 %	19,313,433	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.	PROGRAM PENGLOTOAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Tersangkut ke TPA	12.60 %	13.97 %	1,846,139,500	15.25 %	1,923,662,815	16.65 %	2,060,670,883	18.18 %	2,207,596,717	19.32 %	2,365,219,123	19.32 %	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urutan Pemerintahan dan Program Prioritas Penggunaan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan										Kondisi Kinerja	Pengaruh Daerah Pesaing Jawa
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.14.	UKURAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMENDALAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KKB)	Rasio Akseptor KB	74.33 %	74.55 %	3.421.440,400	74.9 %	3.565.483,103	75.25 %	3.818.988,952	75.35 %	4.091.282,864	75.45 %	4.383.400,461	75.45 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELIAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0 %	21.42 %	888.207,560	35.71 %	925.694,887	50 %	991.511,794	64.28 %	1.062.206,585	100 %	1.138.048,135	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

5.2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional maupun daerah. Mengingat UMKM sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional maka adanya perlu pemberdayaan sektor tersebut. Kebijakan pemberdayaan sektor UMKM diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor.

Salah satu dari delapan tujuan pembangunan milenium adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mendeklarasikan dan menyepakati tujuan pembangunan milenium maka pemerintah bersama-sama masyarakat.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan dari masyarakat yang lemah, renta, miskin, marjinal, dan kelompok perempuan yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. (Sulistiyani, 2004:79-80). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantumasyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik".

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam Huraerah, 2011: 99).

Schingga pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Sementara itu, dalam jurnal internasional Tomey (2009: 181-182) menyebutkan bahwa: "In community development practice, practitioners and organizations play many different roles in the planning, implementation and diffusion of the ideas and projects that they seek to promote. These roles are direct products of multiple and often conflicting forces. the goals of the intervening institution, the needs of the community, the vested interests of state and local governments and business groups, and even the personal aspirations of the individual practitioner. While some of these roles are developed in conjunction with the members of the community to be „developed“, all too often the act of defining such roles is undertaken by an institution or organization that resides outside of the boundaries (whether spatial or symbolic) of the specified community. In turn, these roles are greatly influenced by the constantly evolving moods and shifts of development theory and practice of the day, lined with buzzwords that often have little to do with the overall goal of community development." Pernyataan Tomey tersebut berarti dalam praktik pengembangan masyarakat, praktisi dan organisasi memainkan banyak peran berbeda dalam perencanaan, implementasi, dan penyebaran gagasan dan proyek yang ingin mereka promosikan. Peran-peran ini adalah produk langsung dari banyak kekuatan dan sering bertentangan. tujuan dari lembaga intervensi, kebutuhan masyarakat, kepentingan negara dan pemerintah lokal dan kelompok bisnis, dan bahkan aspirasi pribadi dari praktisi individu.

Sementara beberapa peran ini dikembangkan bersama dengan anggota masyarakat untuk 'dikembangkan', terlalu sering tindakan mendefinisikan peran tersebut dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang berada di luar batas (baik spasial maupun simbol) dari komunitas yang ditentukan. Pada gilirannya, peran-peran ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati yang terus berubah dan pergescran teori dan 20 praktik pembangunan hari itu, dipenuhi dengan kata-kata yang sering tidak ada hubungannya dengan keseluruhan tujuan pengembangan masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa tujuan pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen.

Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen yang bias di kelola untuk dikembangkan semua itu merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Ketiga, hestanto.web.id memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Melihat peran UMKM yang begitu strategis maka UMKM dapat mewujudkan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kalangan UMKM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat banyak tersebut. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (multics years). Berdasarkan hal tersebut diatas didukung oleh program pada Tabel 5.2 (Lampiran).

Tabel 5.2
Program Prioritas

Kode	Bidang Utama Penelitian dan Program Prioritas Penelitian	Indikator Kinerja Program (terutama)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Rencanannya								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
				2022		2023		2024		2025				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil													
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01.	PROGRAM PENGENDALIAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Riset Raga	40,54 %	41,08 %	667.205,727	41,62 %	695.295,008	42,16 %	744.730,269	42,70 %	797.429,858	43,25 %	854.794,910	Uraian Kabupaten
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07.01.	PROGRAM PENGENDALIAN TENAGA KERJA	Pemeriksaan Kegiatan yang dilaksanakan yang sesuai pada RTK	100 %	100 %	18.434.300	100 %	19.210.384	100 %	20.076,342	100 %	21.643,328	100 %	23.617.222	Uraian Kecamatan Model, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.02.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pemeriksaan Tenaga Kerja Yang Dididik	0,02 %	0,07 %	167.142.130	0,09 %	174.178.793	0,1 %	186.592,905	0,12 %	199.604,849	0,22 %	214.125,190	Uraian Kecamatan Model, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.	PROGRAM PENGEMPATAN TENAGA KERJA	Pemeriksaan Tenaga Kerja yang Disempatkan	0,05 %	0,11 %	113.973.700	0,14 %	118.771.993	0,17 %	127.216,681	0,21 %	136.287,231	0,27 %	146.018,129	Uraian Kecamatan Model, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.06.	PROGRAM PENGENDALIAN INDUSTRIAL	Pemeriksaan Perusahaan yang Menerima Tawar Kerja yang Layak (PP/PKS, LKS Raperdi Struktur Skala Upah dan terakreditasi penuh dan Keselamatan)	41 %	50 %	78.450,000	55 %	82.160,585	60 %	88.011,842	75 %	94.287,087	85 %	101.019,185	Uraian Kecamatan Model, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

2 1

Kode	Bidang Utama Pemerintahan dan Program Prioritas Pengembangan	Indikator Kinerja Program (subtema)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pembiayaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023			2024			2025			Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
2.09.03.	PROGRAM PENGUKUTAN DIFERENSIAL DAN KETAHANAN PASOKAN MARTAKAT	Skor PMU kumutasi	85 Skor	85,5 Skor	179.206.250	86 Skor	186.750.833	86,5 Skor	200.028.817	87 Skor	214.290.672	87,5 Skor	229.591.240	87,5 Skor	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.04.	PROGRAM PENGUKUTAN KEMAMPUAN PASOKAN	Persentase Daerah Binaan Pangan yang Terpenuhi	15,38 %	15,38 %	43.621.000	15,38 %	45.665.864	15,38 %	48.912.707	15,38 %	52.400.183	15,38 %	56.141.556	15,38 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.05.	PROGRAM PENGUKUTAN KEAMANAN PASOKAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	80 %	80 %	48.999.000	80 %	51.061.858	80 %	54.692.356	80 %	58.891.921	80 %	62.778.344	80 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN DESA/ PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.02.	PROGRAM PENGUKUTAN DESA	Persentase pengantunan dana terlinggih	8,3 %	10 %	383.320.600	11,11 %	398.194.772	12,5 %	399.373.420	14,28 %	422.492.246	16,67 %	432.658.191	16,67 %	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Nagari
2.13.03.	PROGRAM PENGUKUTAN KESEHATAN DESA	Persentase peningkatan kehidupan desa mandiri	47 %	52 %	52.364.100	57 %	54.777.649	62 %	58.671.697	67 %	62.854.989	72 %	67.342.835	72 %	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Nagari
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PENGUKUTAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintahan Desa	0 Indeks	3,3 Indeks	1.643.443.626	3,6 Indeks	1.712.632.602	3,7 Indeks	1.834.400.780	3,8 Indeks	1.965.103.325	3,9 Indeks	2.106.568.373	3,9 Indeks	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Nagari
2.13.05.	PROGRAM PENGUKUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MUSKIN ADAT	Persentase Peningkatan Perencanaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	100 %	100 %	1.590.939.850	100 %	1.657.929.208	100 %	1.775.818.685	100 %	1.902.434.537	100 %	2.038.208.385	100 %	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Nagari
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN DESA/ PEMERINTAHAN PERDULU DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.02.	PROGRAM PENGUKUTAN PERDULU	Laju Pertumbuhan Perdulu	1,05 %	0,93 %	234.038.206	0,41 %	244.829.411	0,50 %	252.238.782	0,57 %	260.534.385	0,45 %	260.992.971	0,45 %	Dinas Pengendalian Pertumbuhan, Keluarga Berencana, Perencanaan Perencanaan Dan Perencanaan Anak

2 1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Hasilnya Perencanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peningkatan Jumlah
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIDAYAN PERSEKUTUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.02.	PROGRAM PENANGRUHUTAMAAN GENDER DAN PEMERIDAYAN MUHAMMADIYAH	Pemeriksaan ABG pada Sekolah APRED	0.0124 %	0.0126 %	66,668,300	0.0113 %	58,418,354	0.0137 %	62,571,899	0.0140 %	67,033,276	0.0143 %	71,819,452	0.0145 %	Dinas Pengendalian Produksi, Keluaran, Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PERSEKUTUAN	Rasio Keamanan terhadap Perempuan, termasuk TPOD (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0.0002 Risiko	0.0002 Risiko	235,135,790	0.00018 Risiko	245,034,965	0.00017 Risiko	262,156,951	0.00016 Risiko	281,170,132	0.00015 Risiko	301,245,579	0.00015 Risiko	Dinas Pengendalian Produksi, Keluaran, Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.	PROGRAM PEMERIDAYAN BAK ANAK (PBA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	600 angka	600 angka	66,335,350	700 angka	60,023,626	700 angka	73,031,435	730 angka	79,202,767	800 angka	84,857,845	800 angka	Dinas Pengendalian Produksi, Keluaran, Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KELUAS ANAK	Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan yang Didukung Insan Terkuat Kota/Kota	100 %	100 %	228,288,000	100 %	238,178,208	100 %	255,112,678	100 %	273,202,212	100 %	292,815,990	100 %	Dinas Pengendalian Produksi, Keluaran, Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2.09.02.	PROGRAM PENGELUARAN SUMBER DATA EKONOMI UNTUK KEMAJUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketermampuan Pangan Utama (Bersa) Perkapita	608.65 kg/Kapita/Tan	620.8 kg/Kapita/Tan	719,074,200	653 kg/Kapita/Tan	730,285,218	645.2 kg/Kapita/Tan	803,630,497	657.4 kg/Kapita/Tan	860,929,351	657.4 kg/Kapita/Tan	922,399,707	657.4 kg/Kapita/Tan	Dinas Perikanan Dan Pangan

Kode	Bidang Utama Pemerintahan dan Program Prioritas Pengembangan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Klasifikasi Awal	Capaian Kinerja Program dan Rencana Penguatan										Kondisi Klasifikasi pada akhir periode RPJMD	Pencapaian Dampak Jangka Jangka
				2023		2024		2025		2026					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
2.09.03.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI KETERAMPILAN DAN KEMAMPUAN PANGAN Masyarakat	Skor SPPI nasional	85 Skor	85,5 Skor	179.266.250	86 Skor	186.795.833	86,5 Skor	200.078.817	87 Skor	214.200.872	87,5 Skor	229.891.240	87,5 Skor	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.04.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI KEMAMPUAN PANGAN	Pertemuan Daerah Reruan Pangan yang Terintegrasi	15,38 %	15,38 %	43.821.000	15,38 %	43.665.864	15,38 %	48.912.707	15,38 %	52.400.183	15,38 %	56.141.526	15,38 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.05.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI KEMAMPUAN PANGAN	Pertemuan Pangan Besar yang akan dilaksanakan	80 %	80 %	48.999.000	80 %	51.061.858	80 %	54.602.366	80 %	58.491.921	80 %	62.775.384	80 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Peningkatan pengantaraan desa terintegrasi	8,3 %	10 %	353.300.000	11,11 %	368.194.772	12,3 %	394.373.420	14,28 %	422.402.245	16,67 %	452.668.191	16,67 %	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Negeri
2.13.03.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI KEMAMPUAN DESA	Peningkatan peningkatan status desa mandiri	47 %	52 %	52.264.100	57 %	54.779.049	62 %	58.671.697	67 %	62.854.989	72 %	67.342.835	72 %	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Negeri
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	0 Indeks	3,5 Indeks	7.643.443.693	3,6 Indeks	1.712.832.602	3,7 Indeks	1.834.400.780	3,8 Indeks	1.965.193.565	3,9 Indeks	2.105.698.378	3,9 Indeks	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Negeri
2.13.05.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI KEMAMPUAN DESA Masyarakat	Peningkatan Peningkatan Peningkatan Lembaga Kerjasama Masyarakat Masyarakat	100 %	100 %	1.500.950.800	100 %	1.607.939.298	100 %	1.779.818.085	100 %	1.902.434.257	100 %	2.038.208.305	100 %	Dinas Perencanaan Masyarakat Dan Negeri
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN
2.14.02.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI PENGKUALIFIKASI	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05 %	0,93 %	234.938.560	0,81 %	244.829.411	0,69 %	262.236.782	0,57 %	280.534.265	0,45 %	300.982.971	0,45 %	Dinas Perencanaan Produksi, Kularga Desa, Desa, Perencanaan Peningkatan Dan Perencanaan Anak

2 1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (wenknes)	Kendali Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Rerangka Penguasaan										Kendali Kinerja pada akhir periode RP-2020	Pengaruh Dampak Penguasaan
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.14.03.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN KEMERDEKAAN (KB)	Ratio Akreditasi KH	74,13 %	74,55 %	3.431.440,460	74,9 %	3.565.483,103	75,25 %	3.818.088,552	75,35 %	4.051.282,864	75,45 %	4.283.400,461	75,45 %	Dinas Penguasaan Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan, dan Pengembangan
2.14.04.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN KEMERDEKAAN (KB)	Pemerintah pusat pelayanan layanan sejalan (PPNS) dan/atau Kecamatan	0 %	91,49 %	848.297,560	95,71 %	925.694,887	90 %	991.611,794	94,28 %	1.062.205,585	100 %	1.138.048,135	100 %	Dinas Penguasaan Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan, dan Pengembangan
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pemerintah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	77,70 %	78 %	1.699.810,538	79 %	1.719.287,262	80 %	1.841.507,485	81 %	1.972.806,960	82 %	2.113.665,387	82 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pemerintah Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	71,60 %	75 %	920.821,040	78 %	970.008,665	80 %	1.038.976,218	83 %	1.113.055,222	90 %	1.192.527,365	90 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERINTAHAN KOPERASI	Pemerintah Penguasaan Koperasi yang Berkelanjutan	6 %	5 %	22.220,000	5 %	23.447,250	5 %	25.114,349	5 %	26.995,005	5 %	28.826,020	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KEMERDEKAAN KSP/USK KOPERASI	Pemerintah Usaha Koperasi yang menjadi sasaran yang akan Koperasi dengan Wilayah Koperasi dan Dalam Daerah Koperasi	6 %	5 %	71.370,000	5 %	74.384,086	5 %	79.672,762	5 %	85.353,430	5 %	91.447,605	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERINTAHAN KOPERASI	Pemerintah Koperasi yang menjadi sasaran yang akan Koperasi dengan Wilayah Koperasi dan Dalam Daerah Koperasi	6 %	5 %	74.099,700	5 %	78.157,261	5 %	83.714,264	5 %	89.683,591	5 %	96.186,464	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Utama Pemerintahan dan Program Prioritas Pengembangan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Pengaruh Dampak Pengembangan Jenis
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.17.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAIR PERSILANGAN KOTA/KABUPATEN	Pemerintah Kabupaten yang Diberikan Dukungan Kualitas Pendampingan Kebijakan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Strategis dan Dukungan Fasilitas	5 %	24,749,670	5 %	25,791,631	5 %	27,615,416	5 %	29,595,108	5 %	31,708,199	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	
2.17.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN USHA MENENGAH, USHA KECIL, DAN UMKM	Pemerintah Usaha Mikro yang Jujur Wirausaha	35,92 %	49,80 %	97,999,990	63,41 %	102,125,790	76,75 %	109,386,933	89,84 %	117,186,222	99,25 %	125,553,318	99,25 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN USHA	Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	5 %	5 %	8,186,490,310	5 %	8,331,141,532	5 %	9,137,705,716	5 %	9,789,294,134	5 %	10,448,174,737	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.18.	LEMB PERSERIKATAN BIDANG PERANAN MODAL														
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SEKUT PERANAN MODAL	Pemerintah Ketrampilan Dukungan Investasi dan Regulasi	20 %	40 %	146,353,000	50 %	152,514,461	100 %	163,338,239	100 %	175,005,682	100 %	187,901,088	100 %	Dinas Perencanaan Modal, Pengembangan Terpadu Satu Plata Dan Ternaga Kerja
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PERANAN MODAL	Pemerintah Pengembangan Investasi	5 %	5 %	174,451,000	5 %	181,795,998	5 %	194,721,597	5 %	208,660,247	5 %	223,499,662	5 %	Dinas Perencanaan Modal, Pengembangan Terpadu Satu Plata Dan Ternaga Kerja
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PERANAN MODAL	Pemerintah lain usaha yang diberikan tepat waktu	65 %	85 %	2,265,241,707	87 %	2,498,082,383	88 %	2,461,478,040	89 %	2,636,979,282	90 %	2,835,250,663	90 %	Dinas Perencanaan Modal, Pengembangan Terpadu Satu Plata Dan Ternaga Kerja
2.18.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERANAN MODAL	Pemerintah perusahaan yang terdistribusi	20 %	30 %	388,362,000	33 %	300,647,934	40 %	322,694,002	45 %	344,044,314	50 %	369,616,104	50 %	Dinas Perencanaan Modal, Pengembangan Terpadu Satu Plata Dan Ternaga Kerja

21

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kemajuan Pelaksanaan										Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD	Tanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2.18.06.	PROGRAM PENGUJIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pemenuhan Ketermampuan Dan Pemenuhan Modal Berbasis Teknologi	20 %	21.494.000	80 %	22.396.897	100 %	23.091.459	80 %	25.702.060	100 %	27.537.176	100 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	
A. URUAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25.	URUAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.03.	PROGRAM PENGUJIAN PERIKANAN TANGKAP	Pemenuhan Pengujian Produk Perikanan Tangkap	5,6 %	1.103.370.000	5,6 %	1.212.247.877	5,6 %	1.308.545.811	5,6 %	1.391.332.127	5,6 %	1.490.438.961	5,6 %	Dinas Perikanan Dan Pangan	
3.25.04.	PROGRAM PENGUJIAN PERIKANAN BERDAYA	Pemenuhan Pengujian Produk Perikanan Berdaya	7,50 %	600.000.000	8,25 %	625.260.000	8,51 %	669.715.986	8,30 %	717.466.736	9,30 %	768.693.861	9,30 %	Dinas Perikanan Dan Pangan	
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemenuhan Ragu yang terlindungi perikanan regulasi penggunaan alat tangkap	0 %	240.000.000	16,67 %	250.000.000	16,67 %	300.000.000	16,67 %	350.000.000	16,67 %	400.000.000	16,67 %	Dinas Perikanan Dan Pangan	
3.25.06.	PROGRAM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	37 Kg/Kapita	100.000.000	38,10 Kg/Kapita	104.210.000	40,10 Kg/Kapita	111.619.331	41 Kg/Kapita	119.877.789	41 Kg/Kapita	126.115.643	41 Kg/Kapita	Dinas Perikanan Dan Pangan	
3.26.	URUAN PEMERINTAHAN BIDANG PASARISATA														
3.26.02.	PROGRAM PENGUJIAN DATA TARIK DESTINASI PASARISATA	Pemenuhan Destinasi Wisata Unggulan/Pemas yang dibestinasikan	1,5 %	6.892.172.279	1,5 %	7.162.332.732	1,5 %	7.692.960.589	1,0 %	8.241.607.246	5 %	8.829.980.883	5 %	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
3.26.03.	PROGRAM PEMANFAATAN PARTISIPASI	Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/dipromosikan	3 Paket	600.000.000	10 Paket	625.260.000	15 Paket	669.715.986	20 Paket	717.466.736	25 Paket	768.693.861	25 Paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PENGUJIAN TALE KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang terjual dan ekspansi kreatifitas (IKK)	0 IKK	100.000.000	20 IKK	180.000.000	25 IKK	200.000.000	30 IKK	250.000.000	35 IKK	300.000.000	35 IKK	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PASARISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pemenuhan Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibestinasikan	0 %	207.902.000	1,5 %	310.537.463	20 %	332.616.677	25 %	356.532.246	30 %	381.774.368	30 %	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
3.27.	URUAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3.27.02.	PROGRAM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN SARANA PERTANIAN	Pemenuhan Pengujian Produk/Hasil Pertanian	1 %	4.782.252.200	1,1 %	4.983.585.018	1,1 %	5.337.917.912	1,1 %	5.718.511.460	1,1 %	6.126.812.178	1,1 %	Dinas Pertanian	

8 1

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pendukung												Kondisi Kinerja pada akhir periode RP-JMD	Peringkat Daerah Pemerintah Kabupaten
				2022			2023			2024			2026				
				target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp			
3.11.02.	PROGRAM PENGKUALIFIKASI DAN PENGALIHAN KELOMPOK PEKERJA	Persentase antara industri yang direalisasi	2 %	1,422,035,940	4 %	1,482,943,753	6 %	1,548,383,106	8 %	1,701,634,918	10 %	1,823,131,651	10 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan			
3.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN ZONE USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase lain Usaha Industri yang direalisasi	100 %	22,493,710	100 %	23,440,695	100 %	25,107,329	100 %	26,897,481	100 %	28,817,561	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan			
3.11.04.	PROGRAM PENGALIHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data (Informasi) Industri yang Tersedia	15 %	56,000,000	45 %	75,000,000	75 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	300,000,000	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan			

28

5.3 Program Dengan Dana Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

5.3.1 Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

5.3.2 Tujuan Dana

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkanannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

5.3.3 Alokasi Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

5.3.4 Pengelolaan Keuangan Desa belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belanja Nagari dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa :
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
 - 5) pertanahan.
2. pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas :
 - 1) pendidikan.
 - 2) Kesehatan.
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - 4) kawasan permukiman.
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup.
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - 7) energi dan sumber daya mineral.
 - 8) Pariwisata.

3. pembinaan kemasyarakatan Desa
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - 2) kebudayaan dan kegamaan.
 - 3) kepemudaan dan olah raga.
 - 4) kelembagaan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa
 - 1) kelautan dan perikanan.
 - 2) pertanian dan peternakan.
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa.
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
 - 6) dukungan penanaman modal.
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - 1) penanggulangan bencana.
 - 2) keadaan darurat.
 - 3) keadaan mendesak.

5.3.4 Program Dengan Dana Desa Nagari Se-Kabupaten Solok

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada penetapan prioritas yang mengacu kepada penetapan prioritas oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Salah satu program prioritas yang wajib dibiayai dari dana desa adalah program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Untuk lebih jelas program kegiatan yang didukung oleh dana desa dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5. 1 Program dana desa

PROGRAM	SUB BIDANG
Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kawasan Pemukiman 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7. Energi dan Sumber Daya Mineral

	8. Pariwisata
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2. Kebudayaan dan Keagamaan 3. Kepemudaan dan Olah Raga 4. Kelembagaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kelauatan dan Perikanan 2. Pertanian dan Peternakan 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari 4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 6. Dukungan Penanaman Modal 7. Perdagangan dan Perindustrian
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1. Penanggulangan Bencana 2. Keadaan Darurat 3. Keadaan Mendesak
6. Pembiayaan	1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan

BAB VI

LOKASI PRIORITAS

Upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah dan terukur dengan ditetapkannya lokasi prioritas. Pemilihan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan didasarkan kepada Identifikasi masalah kemiskinan dan sebaran intervensi data DTKS . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1

6.1 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan didasarkan kepada Identifikasi masalah kemiskinan dan sebaran intervensi data DTKS

NO	NAMA	PKH	KIP	RASKIN	Akses Pendidikan Dasar	KIS
1	Tigo Lurah	/	/	/	/	/
2	Hiliran Gumanti	/	/	/	/	/
3	X Koto Diatas	/	/	/	/	/
4	Pantai Cermin	/	/	/	/	/
5	Junjung Sirih	/	/	/	/	/
6	Danau Kembar	/	/	/	/	/
7	Lembang Jaya	/	/	/	/	/
8	IX Koto Sungai Lasi	/	/	/	/	/
9	Lembah Gumanti	/	/	/	/	/
10	X Koto Singkarak	/	/	/	/	/
11	Gunung Talang	/	/	/	/	/
12	Bukit Sundi	/	/	/	/	/
13	Kubung	/	/	/	/	/
14	Payung Sekaki	/	/	/	/	/

[illegible]

Tabel 6.3 Lokasi Intervensi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

NO	KECAMATAN	UMKM	Akses Perdagang	Isu	Transportasi Umum	Infrastruktur Jalan
1	Tigo Lurah	Bangkang Lulu, Batu Bajanjang, gasebok data, Tj Balik Siriso, Sumanau	Gasebok Data, Tj Batu Sumanau	Bangkang Lulu, Sumanau	Gasebok Data, Bangkang Lulu, Batu Bajanjang, Tj Balik Sumanau	Bangkang Lulu, Gasebok Data
2	Hiliran Gumanil		Talang Bahung, Sungai Aba,		Pagihau, Bukit Kandung, Kacalo, Lulu Panjang,	
3	X Koto Talua	Padihan, Pantajan	Tj Balik, Pantajan, Kundi, Kandi, Padihan, Bukit Kandung, Sumanau, Lulu Panjang	Kundi, Kandi, Padihan, Lulu Panjang		
4	Pantai Cernin			Lulu	Lulu, Sutan,	
5	Junjung Sirih			Muaro Pangal	Muaro Pangal,	
6	Daua Kembar	Simpang Tj nan IV	Simpang Tj Nan IV, Zampang Batu Dalam	Kandung Batu Dalam,	Simpang Tj Nan IV,	
7	Lembang Jaya	Koto Laweh,	Batu Banyak, Batu Bajanjang, Koto Laweh, Lulu Panjang, Koto Gading Koto Anai	Batu Banyak, Batu Bajanjang, Koto Laweh, Lulu Panjang, Koto Gading Koto Anai	Batu Bajanjang, Lulu Panjang, Batu Banyak, Koto Gading Koto Anai,	Lulu Panjang,
8	IX Koto Sungai Lail	Koto Laweh, Panggu,	Bukit Balu,	Batu Banyak, Sungai Durian, Bukit Balu, Sungai Jambur, Gasebok Sural Koto Laweh, Induhur, Panggu	Batu Banyak, Sungai Durian, Bukit Balu, Koto Laweh, Tandung sarung, Panggu, Sungai Jambur, Induhur,	
9	Lembah Gumanil	Sungai Naman, Air Dingin, Alahan Panjang,	Sungai Naman, Salimpul Air Dingin	Salimpul,	Sungai Naman, Salimpul, Air Dingin	
10	X Koto Singasak	Aripin, Suman, Koto Sari	Kocang,	Taluk, Koto Sari, Aripin, Tandung Alai, Suman, Suman	Koto Sari, Tandung Alai, Aripin,	
11	Dzung Talang	Talang, Batang Barua,	Joni-Joni, sungai Jariyah, Batang Barua, Air Batanghulu,	Joni-Joni, Sungai Jariyah, Air Batanghulu, Koto Gasek Gasek	Sungai Jariyah, Air Batanghulu, Koto Gasek Gasek,	
12	Bukit Barali	Muaro Panteh,		Kandi, Bukit Tundung, Pambuhutan, Dham,	Muaro Panteh, Bukit Tandung, Pambuhutan, Dham,	

13	Kubang	Tj Bingkung, Gantung Ciri, Seak Laweh,	Selayo, Gantung, gantung Ciri, Seak Laweh, Koto Hilalang, Tj Bingkung	Koto Baru, Panyangbesan, Gantung, Seak Laweh, Koto Hilalang, Tj Bingkung, Gantung Ciri	Gantung, Koto Hilalang, Panyangbesan, Gantung Ciri	
14	Purung Sekadi		Aie Luo, Sirubam		Aie Luo, Supayang, Sirubam,	

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JASRA ARNODA